



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA

- Menimbang : a. bahwa perubahan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan perubahan rencana pembangunan lima tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 440);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569)

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);
31. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026.



Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 69), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 17 Mei 2023


BUPATI SUMBAWA

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 17 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA


SETDA
HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SUMBAWA NOMOR 69
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DINAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, ketentuan pada Pasal 29 Ayat (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Priode 5 (lima) tahun. Renstra selanjutnya menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 30 Ayat (1) menyatakan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode (satu) tahun.

Memperhatikan pada Pasal 16 Ayat (2) selanjutnya menyebutkan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun secara bertahap, yang dimulai dengan (a) persiapan penyusunan (b) penyusunan rancangan awal (c) penyusunan rancangan (d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah (e) perumusan rancangan akhir dan (f) penetapan.

h

RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa serta berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa 2021-2026, Renstra memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dokumen Renstra ini berfungsi untuk menuntun dan memberikan arah kepada segenap penyelenggara kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan agar secara konsisten dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai posisi peran dan porsi tanggung jawab yang diemban. Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa dirumuskan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh unsur yang ada sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab persoalan yang ada serta memiliki tingkat fleksibilitas dalam menyikapi perkembangan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi dalam masyarakat baik dalam lingkup lokal, regional maupun nasional.

Untuk menjawab ketiga hal tersebut Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa 2021-2026 disusun dengan tetap memperhatikan arah kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Propinsi NTB tahun 2019-2024, Renstra Direktorat Jenderal Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2019-2024 sebagai bentuk sinkronisasi perencanaan pembangunan yang menyeluruh dan merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan renstra Dinas Ketahanan Pangan disusun berlandaskan atau berdasarkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 440);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569)
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);
32. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 19);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan dalam bidang urusan pangan selama lima tahun ke depan, yang mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan memperhatikan gambaran umum kondisi daerah serta kebijakan nasional dan provinsi.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan bertujuan untuk :

1. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja pembangunan Ketahanan Pangan serta perencanaan penganggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa
2. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan yang sinergis dan terpadu antara Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

BAB. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Kebijakan

BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB. VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa merupakan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa.

Organisasi Perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa.

2.1.1. Susunan Organisasi

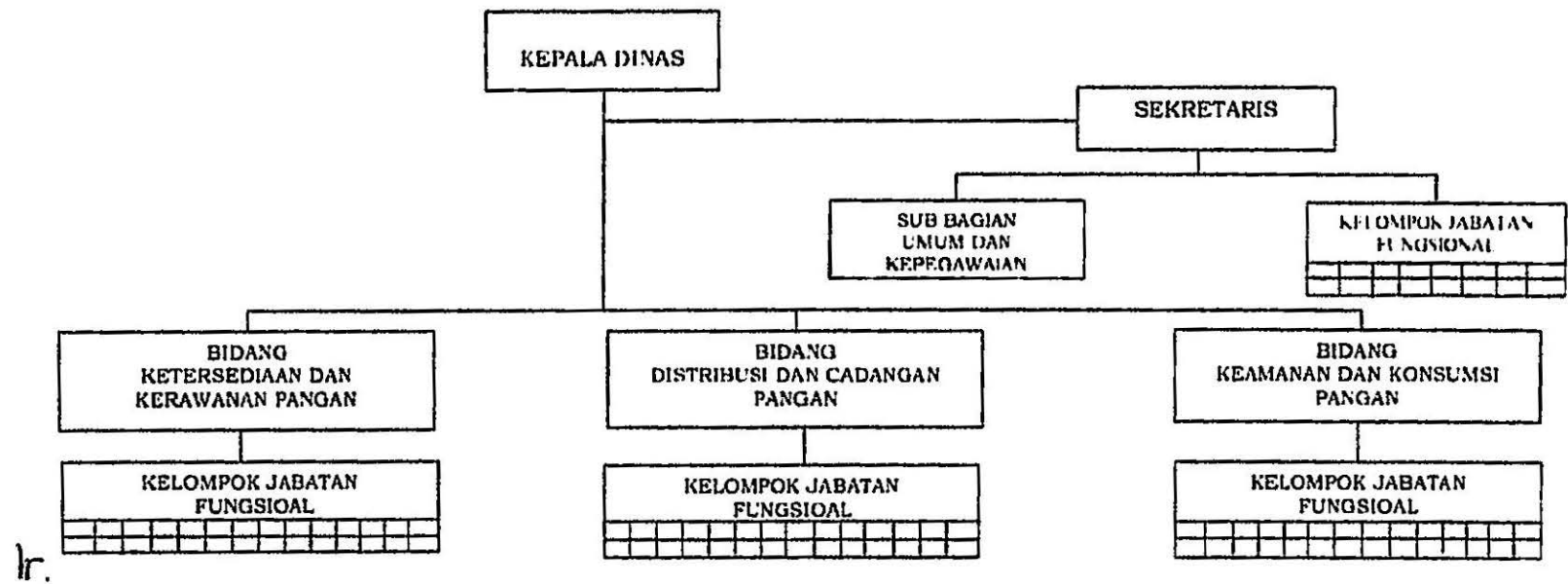
Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri atas:
 1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
 2. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR. TAHUN 2022 NO OR 19.1.2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 59 TAHUN 2020
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGANKABUPATEN SUMBAWA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMBAWA**



2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pangan. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan Perencanaan Bidang Pangan
- b) Perumusan kebijakan teknis dibidang pangan
- c) Pengkoordinasian Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pangan
- d) Pembinaan, Pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan.
- e) Pelaksanaan Kegiatan penatausahaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Dinas

- a) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, kerawanan, cadangan, distribusi, keamanan dan konsumsi pangan;
 - b. pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan, kerawanan, cadangan, distribusi, keamanan dan konsumsi pangan; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- d) Rincian Tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun Perencanaan di bidang pangan
 - b. Memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan di
kr bidang pangan;

- c. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pangan;
- d. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pangan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan;
- f. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, kerawanan, cadangan, distribusi, keamanan dan konsumsi pangan;
- g. melaksanakan administrasi/penatausahaan Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin Oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi;
4. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
5. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
6. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
7. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
8. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

- a) merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b) Mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c) menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;

- d) mengumpulkan bahan dalam penyusunan perencanaan keuangan dan pelaporan Dinas;
- e) melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan perencanaan keuangan dan pelaporan tahunan Dinas;
- f) mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
- g) menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
- h) menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Dinas, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas dan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas;
- i) melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- j) melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- k) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas
2. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan;

- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan adalah sebagai berikut:

- a) merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan dan penurunan kerawanan pangan;
- b) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan penurunan kerawanan pangan;
- c) menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan pangan;
- d) menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan;
- e) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik diantaranya kawasan mandiri pangan, pertanian masuk sekolah, pertanian keluarga, pengembangan korporasi usaha tani dan infrastruktur logistik lainnya;
- f) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten;
- g) melaksanakan penyusunan rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan;
- h) menyiapkan infrastruktur lumbung pangan, lantai jemur dan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya;
- i) menganalisis bahan perumusan kebijakan pencegahan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dan intervensi penanganan daerah rawan pangan;
- j) menyelenggarakan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan;

- k) mengembangkan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan;
- l) melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- m) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan;
- n) menyiapkan penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerawanan pangan;
- o) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan penurunan kerawanan pangan; dan
- p) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

- 1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
- 2) Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang distribusi dan cadangan pangan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
- 4) pada ayat (2), Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendistribusian dan penyediaan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendistribusian dan penyediaan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendistribusian dan penyediaan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan adalah sebagai berikut:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang distribusi pangan dan cadangan pangan;
- b) memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang distribusi pangan dan cadangan pangan;
- c) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan dan cadangan pangan;
- d) menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis jaringan distribusi pangan, kelembagaan distribusi pangan, cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
- e) menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria distribusi pangan dan kelembagaan distribusi pangan;
- f) melaksanakan persiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria cadangan pangan Daerah dan cadangan pangan masyarakat;
- g) menyiapkan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan;
- h) menyediakan pangan berbasis sumber daya lokal;
- i) melakukan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi harga pokok dan pangan lainnya serta penentuan harga minimum pangan pokok lokal;
- j) melaksanakan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan;
- k) melaksanakan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi serta kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia;
- l) menyiapkan bahan perencanaan dan penyediaan sarana distribusi pangan masyarakat;
- m) menyiapkan bahan pengkajian, bimbingan teknis distribusi pangan, pengembangan jaringan distribusi pangan pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengatasi situasi rawan pangan;
- n) melakukan penyusunan draft analisis distribusi pangan berupa identifikasi pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat;
- o) menyiapkan bahan informasi distribusi pangan melakukan kegiatan identifikasi, monitoring dan evaluasi, pengembangan jaringan distribusi pangan masyarakat;

- p) melakukan pemantauan arus distribusi pangan yang keluar maupun yang masuk ke Daerah;
- q) melaksanakan kerja sama pengembangan jaringan distribusi pangan pemerintah dan masyarakat;
- r) menyiapkan bahan koordinasi cadangan pangan pemerintah dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor;
- s) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan kebijakan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat serta bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- t) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Daerah pada lokasi daerah rawanan pangan;
- u) menyiapkan draf analisis cadangan pangan dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor, berupa cadangan pangan dan keseimbangan cadangan pangan daerah dan analisis lainnya;
- v) menyiapkan bahan bimbingan teknis cadangan pangan pemerintah dan masyarakat serta bahan informasi cadangan pangan dan menyusun rencana kebutuhan pangan lokal;
- w) melaksanakan pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- x) menyiapkan bahan koordinasi cadangan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional;
- y) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
- z) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan

- 1) Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

hr

- 2) Kepala Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang keamanan dan konsumsi pangan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang keamanan dan konsumsi pangan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang keamanan dan konsumsi pangan;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang keamanan dan konsumsi pangan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Rincian tugas Kepala Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan adalah sebagai berikut:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang keamanan dan konsumsi pangan;
- b) memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang keamanan dan konsumsi pangan;
- c) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang keamanan dan konsumsi pangan;
- d) menyelenggarakan sosialisasi keamanan pangan dan kelembagaan pangan;
- e) mengembangkan perencanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan dan produk pangan;
- f) melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan keamanan pangan, kelembagaan pangan, pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;
- g) menyiapkan bahan koordinasi dengan sektor terkait tentang pengawasan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pencapaian target konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- h) menyusun bahan koordinasi pengawasan mutu dan keamanan produk pangan;
- i) menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan mutu dan keamanan pangan;

t

- j) melaksanakan koordinasi dalam pengujian laboratorium keamanan pangan, pengambilan sampel pangan untuk bahan pengujian laboratorium dan analisis hasil uji laboratorium untuk bahan rekomendasi keamanan pangan;
- k) melaksanakan pembinaan terhadap kelompok/perorangan untuk sertifikasi sistem budidaya produk/sertifikat prima dan bimbingan teknis dan supervisi pengawasan pangan dan kelembagaan pangan termasuk penguatan kelembagaan keamanan pangan segar Daerah;
- l) melaksanakan sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan Daerah serta registrasi dan rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan Daerah;
- m) menyiapkan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan Daerah;
- n) menyelenggarakan kegiatan promosi pangan non beras dan non terigu;
- o) mengembangkan teknologi pengolahan pangan lokal dan pangan lainnya;
- p) menyusun dan menetapkan target konsumsi pangan perkapita pertahun;
- q) menyiapkan bahan analisis konsumsi dan menyusun pola pangan harapan;
- r) merencanakan sosialisasi konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- s) melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal seperti lomba cipta menu beragam bergizi seimbang dan aman, peringatan hari pangan sedunia, pengembangan pangan lestari dan pengembangan obor pangan lestari;
- t) melaksanakan penyusunan kebijakan, pengkajian dan koordinasi pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;
- u) menyelenggarakan kebijakan dan pemantapan pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;
- v) menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;
- w) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keamanan dan konsumsi pangan; dan

lr

- x) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas, baik tugas rutin maupun pelaksanaan berbagai kegiatan yang terprogram, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa didukung oleh 30 orang pegawai berdasarkan golongan, jenjang pendidikan dan jenis kelamin serta batas pensiunan pegawai. Data-data tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

| No | Status | Golongan | | | | Jumlah |
|--------|--------|----------|----|-----|----|--------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | CPNS | - | - | 1 | | 1 |
| 2 | PNS | - | 1 | 16 | 5 | 22 |
| Jumlah | | - | 1 | 17 | 5 | 23 |

Tabel 2.2. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

| No | Pendidikan | CPNS | PNS | Tenaga Kontrak | Jumlah |
|--------|------------|------|-----|----------------|--------|
| 1 | Doktor | - | - | - | - |
| 2 | Strata 2 | - | 2 | - | 2 |
| 3 | Strata 1 | 1 | 17 | 5 | 23 |
| 4 | D3 | - | 1 | - | 1 |
| 5 | SLTA | - | 2 | 2 | 4 |
| 6 | SLTP | - | - | - | - |
| 7 | SD | - | - | - | - |
| Jumlah | | 1 | 22 | 7 | 30 |

Tabel 2.3. Data Batas Pensiunan Pegawai

| NO | NAMA/NIP | L/P | PANGKAT | | TAHUN PENSIUN | UMUR PADA TAHUN 2022 |
|----|--|-----|--------------------------|------------|---------------|----------------------|
| | | | PANGKAT/ GOL. RUANG | TMT | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ir. Irin Wahyu Indarni 19650320 198503 2 006 | P | Pembina Utama Muda, IV/c | 01-10-2019 | 2025 | 57 |
| 2 | Ir. S. Darmsya 19660616 199303 1 003 | L | Pembina Tk I, IV/b | 01-04-2019 | 2024 | 56 |
| 3 | Dinar, S.Pi. 19681231 199603 2 021 | P | Pembina, IV/a | 01-10-2011 | 2025 | 54 |
| 4 | Hj. Jamilla, SP 19670323 198803 2 016 | P | Pembina, IV/a | 01-10-2019 | 2026 | 54 |
| 5 | Nur Isna Sitoresmi, S.Sos.,M.Si. 19780616 200604 2 010 | P | Pembina, IV/a | 01-04-2017 | 2036 | 44 |
| 6 | Elin Karlina, SP.M.P. 19750317 200701 2 019 | P | Pembina, IV/a | 01-04-2019 | 2033 | 47 |

| NO | NAMA/NIP | L/P | PANGKAT | | TAHUN PENSIUN | UMUR PADA TAHUN 2022 |
|----|--|-----|----------------------------|------------|---------------|----------------------|
| | | | PANGKAT/ GOL. RUANG | TMT | | |
| 7 | Ambo Nurfietrahyuddin, S.Pt 19741127 200701 1 011 | L | Penata Tk. I, III/d | 01-04-2018 | 2032 | 48 |
| 8 | Syafrida, S.Sos. 19740202 199603 2 003 | P | Penata Tk. I, III/d | 01-04-2016 | 2032 | 48 |
| 9 | Neti Herawati, S.Pt 19750920 200701 2 025 | P | Penata Tk. I, III/d | 01-04-2019 | 2033 | 47 |
| 10 | Wahyuningsih, SP 19761117 200701 2 018 | P | Penata Tk. I, III/d | 01-04-2019 | 2034 | 46 |
| 11 | Rahmi Hidayah, SP 19770822 200701 2 021 | P | Penata Tk. I, III/d | 01-04-2019 | 2035 | 45 |
| 12 | Wirawan Dimeng, SP. 19781102 200803 1 002 | L | Penata Tk. I, III/d | 01-10-2021 | 2036 | 44 |
| 13 | M. Ichsan, SE 19710112 200701 1 017 | L | Penata Tk. I, III/d | 01-04-2019 | 2029 | 51 |
| 14 | Citra Anggeraini, SP 19760501 200801 2 016 | P | Penata Tk. I, III/d | 01-04-2020 | 2034 | 46 |
| 15 | Dedeh Winengsih, S.TP 19760209 200901 2 003 | P | Penata Tk. I, III/d | 01-04-2017 | 2034 | 46 |
| 16 | Nurmansyah 19661231 198703 1 125 | L | Penata Muda TK I III/b | 01-04-2006 | 2024 | 56 |
| 17 | Ermiaty, SE 19820601 200701 2 007 | P | Penata, III/c | 01-04-2019 | 2040 | 40 |
| 18 | Sumiati, SE 19820211 201001 2 003 | P | Penata Muda TK I III/b | 01-04-2019 | 2040 | 40 |
| 19 | Endang Purnamasari, SP 19860226 201001 2 033 | P | Penata Muda TK I III/b | 01-04-2017 | 2044 | 36 |
| 20 | Wiwied Muriyanto, SE 19840317 201001 1 005 | L | Penata Muda TK I, III/b | 01-10-2019 | 2042 | 38 |
| 21 | Afni, A.Md.Pms 19770613 200501 2 001 | P | Penata Muda , III/a | 01-04-2019 | 2035 | 45 |
| 22 | Rahman Hidayat 19710527 200801 1 006 | L | Pengatur TK I, II/d | 01-04-2020 | 2029 | 51 |
| 23 | Masyatullailani, S.T.P 19970610 202203 2 018 | P | Penata Muda , III/a | 01-10-2019 | 2055 | 24 |

Jumlah seluruh pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa adalah 30 Orang Pegawai yang terdiri dari 16 Pegawai Perempuan dan 14 Pegawai laki-laki.

2.2.2. Aset / Modal

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah yang lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa selaku Kuasa Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan penertiban asset melalui kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam DBP/ DBKP menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Pencatatan barang milik daerah yang dikelola atau berada di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa disesuaikan dengan sebaran terhadap pemanfaatan asset/modal tersebut sebagaimana dimuat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) yang pengadaan bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Berikut disajikan data asset/modal pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa berdasarkan jenis asset sesuai data KIB Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa s.d. Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 2.4. Aset / Modal Penunjang



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A
TANAH

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
Bidang : Bidang Pertanian
Unit Organisasi : Dinas Pangan
Sub Unit Organisasi : Dinas Pangan
UPB : Dinas Pangan

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.11.06.01.01

| No. | Jenis Barang / Nama Barang | Nomor | | Luas (M2) | Tahun Pengadaan | Letak/ Alamat | Sertifikat | | | Pergunaan | Asal usul | Harga (ribuan Rp) | Keterangan | |
|---------------------|----------------------------------|-----------------|----------|-----------|-----------------|--|------------|------------|------------|-----------|------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| | | Kode Barang | Register | | | | Hak | Tanggal | Nomor | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 01.01.01.04.001 | 000001 | 861,00 | 2014 | Jalan Bungur - Semu No.7 RT. 001 RW. 001 Dusun Kauman Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas | Hak Pakai | 25/10/2005 | | 24 | kantor Dinas Pangan | pembelian | 210.000,00 | kantor Dinas Pangan |
| 2 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | | | | | Ds. Labangka | | | 19/03/2015 | 15 | Gudang Pangan (SRG) Labangka | pembelian | | |
| Jumlah Harga | | | | | | | | | | | | 210.000,00 | | |

lr.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kab./Kota PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
Bidang Bidang Pertanian
Unit Organisasi Dinas Pangan
Sub Unit Dinas Pangan
U P B Dinas Pangan

NO. KODE LOKASI 12.15.06.11.06.01.01

| No. | Kode Barang 1.3. | Jenis Barang / Nama Barang | Nomor Reglster | Merk/ Type | Ukuran / cc | Bahan | Tahun Pem- belian | Nomor | | | | Asal usul | Harga (ribuan Rp) | Keterangan |
|-----|---------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------|-------------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | Rangka | Mesin | Polisi | BPKB | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 02.01.03.05.010 | Pompa Air | 000001 | Sanyo / PH-130B | | Besi | 2017 | | | | | Pembelian | 1.850,00 | Pengadaan Mesin Air Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa |
| 2 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000001 | Honda / Supra | 100cc | Besi | 2001 | MH1KEV7101K00 3762 | KEV7E1003728 | EA 3000 AA | C No 1160534 | Pembelian | 10.500,00 | |
| 3 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000002 | Honda / Supra | 100cc | Besi | 2001 | MH1KEV7161K00 3541 | KEV7E1003655 | EA 3003 AA | C No 1160613 | Pembelian | 10.500,00 | |
| 4 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000003 | Honda / Win | 100cc | Besi | 2001 | MH1HABA1X1K0 60385 | HABAE1060370 | EA 2996 AA | C No 0142716 | Pembelian | 9.500,00 | |
| 5 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000004 | Honda / Win | 100cc | Besi | 2001 | MH1HABA131K0 60387 | HABAE1060340 | EA 2997 AA | C No 1160537 | Pembelian | 9.500,00 | |
| 6 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000005 | Honda / Win | 100cc | Besi | 2001 | MH1HABA191K0 60393 | HABAE1060375 | EA 2998 AA | C No 1160536 | Pembelian | 9.500,00 | |
| 7 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000006 | Honda / Win | 100cc | Besi | 2001 | MH1HABA171K0 60389 | HABAE1060383 | EA 2999 AA | C No 1160535 | Pembelian | 9.500,00 | |
| 8 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000007 | Honda / Win | 100cc | Besi | 2001 | MH1HABA131K0 60356 | HABAE1060362 | EA 3001 AA | C No 1160533 | Pembelian | 9.500,00 | |
| 9 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000008 | Honda / Win | 100cc | Besi | 2001 | MH1HABA191K0 60362 | HABAE1060380 | EA 3002 AA | C No 1160532 | Pembelian | 9.500,00 | |
| 10 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000009 | Honda / Win | 100cc | Besi | 2002 | MH1HABA122K0 66845 | HABAE1066144 | EA 3052 AA | C No 3227103 | Pembelian | 9.450,00 | |

| No. | Kode Barang 1.3. | Jenis Barang / Nama Barang | Nomor Register | Merk/ Type | Ukuran / cc | Bahan | Tahun Pembelian | Nomor | | | | Asal usul | Harga (ribuan Rp) | Keterangan |
|-----|---------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------|--------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------------------|------------|
| | | | | | | | | Rangka | Mesin | Polisi | BPKB | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000010 | Honda / Win | 100cc | Besi | 2002 | MH1HABA172K066842 | HABAE1066151 | EA 3053 AA | C No 3227167 | Pembelian | 9.450,00 | |
| 12 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000011 | Honda / Win | 100cc | Besi | 2002 | MH1HABA152K066810 | HABAE1066194 | EA 3485 AA | C No 3227102 | Pembelian | 9.450,00 | |
| 13 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000012 | Honda / Win | 100cc | Besi | 2002 | MH1HABA182K066820 | HABAE1066160 | EA 3055 AA | C No 3227101 | Pembelian | 9.450,00 | |
| 14 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000013 | Honda / Win | 100cc | Besi | 2002 | MH1HABA182K066834 | HABAE1066148 | EA 3056 AA | C No 3227204 | Pembelian | 9.450,00 | |
| 15 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000014 | Honda / Win | 100cc | Besi | 2002 | MH1HABA192K066812 | HABAE1066152 | EA 3057 AA | C No 3227170 | Pembelian | 9.450,00 | |
| 16 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000015 | Honda / Win | 100cc | Besi | 2002 | MH1HABA132K066823 | HABAE1066184 | EA 3061 AA | C No 3227120 | Pembelian | 9.450,00 | |
| 17 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000016 | Honda / Supra V | 100cc | Besi | 2002 | MH1KEV51X2K011887 | KEV5E1012635 | EA 305B AA | C No 3227203 | Pembelian | 9.600,00 | |
| 18 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000017 | Honda / Supra V | 100cc | Besi | 2002 | MH1KEV5122K008773 | KEV5E1008933 | EA 3059 AA | C No 3227202 | Pembelian | 9.600,00 | |
| 19 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000018 | Honda / Supra V | 100cc | Besi | 2002 | MH1KEV5132K014050 | KEV5E1014098 | EA 3060 AA | C No 3227169 | Pembelian | 9.600,00 | |
| 20 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000019 | Honda / Win | 100cc | Besi | 2003 | MH1HABD113K003796 | HABDE1003790 | EA 3224 AA | C No 6973633 | Pembelian | 9.761,00 | |
| 21 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000020 | Honda / Win | 100cc | Besi | 2003 | MH1HABD163K004670 | HABDE1005910 | EA 3225 AA | C No 6973651 | Pembelian | 9.761,00 | |
| 22 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000021 | Honda / Win | 100cc | Besi | 2003 | MH1HABD163K003695 | HABDE1003503 | EA 3226 AA | - | Pembelian | 9.761,00 | |
| 23 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000022 | Honda / Win | 100cc | Besi | 2003 | MH1HABD183K004685 | HABDE1005896 | EA 3228 AA | C No 6973635 | Pembelian | 9.761,00 | |
| 24 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000023 | Honda / Win | 100cc | Besi | 2003 | MH1HABD153K004689 | HABDE1005897 | EA 3229 AA | C No 6973634 | Pembelian | 9.761,00 | |
| 25 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000024 | Honda / Win | 100cc | Besi | 2003 | MH1HABD163K004653 | HABDE1005870 | EA 3230 AA | C No 6973656 | Pembelian | 9.761,00 | |
| 26 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000025 | Honda / Win | 100cc | Besi | 2003 | MH1HABD113K004687 | HABDE1005882 | EA 3233 AA | C No 6973652 | Pembelian | 9.761,00 | |
| 27 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000026 | Honda / Win | 100cc | Besi | 2003 | MH1HABD163K004684 | HABDE1005917 | EA 3234 AA | C No 6973632 | Pembelian | 9.761,00 | |

| No. | Kode Barang 1.3. | Jenis Barang / Nama Barang | Nomor Register | Merk / Type | Ukuran / CC | Bahan | Tahun Pembelian | Nomor | | | | Asal usul | Harga (ribuan Rp) | Keterangan |
|-----|------------------|---|-------------------|--------------------|-------------|----------|-----------------|--------------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------------|---|
| | | | | | | | | Rangka | Mesin | Polisi | BPKB | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 28 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000027 | Honda / Win | 100cc | Besi | 2003 | MH1HABD153K009925 | HABDE1011082 | EA 3236 AA | C No 6973631 | Pembelian | 9.761,00 | |
| 29 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000028 | Honda / Win | 100cc | Besi | 2003 | MH1HABD113K009937 | HABDE1011062 | EA 3237 AA | C No 6973630 | Pembelian | 9.761,00 | |
| 30 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000029 | Honda / Supra | 100cc | Besi | 2003 | MH1KEV9163K127955 | KEV9E1127890 | EA 3227 AA | C No 6973653 | Pembelian | 10.685,00 | |
| 31 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000030 | Honda / Supra | 100cc | Besi | 2003 | MH1KEV9143K129428 | KEV9E1128952 | EA 3231 AA | C No 6973655 | Pembelian | 10.685,00 | |
| 32 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000031 | Honda / Supra 125 | 125cc | Besi | 2006 | MH1JB4J186K052965 | JB4JE1052296 | EA 3333 AA | D No 9093005 | Pembelian | 13.000,00 | |
| 33 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000032 | Honda / Supra 125 | 125cc | Besi | 2006 | MH1JB4J176K052195 | JB4JE1051587 | EA 3334 AA | D No 9093006 | Pembelian | 13.000,00 | |
| 34 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000033 | Honda / Supra 125 | 125cc | Besi | 2006 | MH1JB4J186K052397 | JB4JE1051688 | EA 3335 AA | D No 9093004 | Pembelian | 13.000,00 | |
| 35 | 02.02.01.01.006 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 000034 | - | 1298 | Besi | 2011 | MH1KV18A2JBK114898 | DJ35059 | EA 1835 AA | I-04700379 | Pembelian | 145.550,00 | Mobil Roda 4 Xenia |
| 36 | 02.02.02.01.002 | Gerobak Dorong | 000001 s/d 000002 | - | | | 2014 | | | | | Pembelian | 2.000,00 | |
| 37 | 02.03.01.07.001 | Mesin Jahit Terpal | 000001 | New Long / 7A | | | 2015 | | | | | Pembelian | 2.500,00 | |
| 38 | 02.03.03.10.002 | Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg | 000001 | Henherr / Digital | | | 2014 | | | | | Pembelian | 3.375,00 | |
| 39 | 02.04.01.02.007 | Penyemprot Tangan (Hand Sprayer) | 000001 | Knapsack Sprayer | | Campuran | 2017 | | | | | Pembelian | 1.500,00 | Pengadaan hand sprayer Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa |
| 40 | 02.04.01.03.005 | Alat Pengereng (Dryer) | 000001 | Piasindo / MB423 | | | 2014 | | | | | Pembelian | 2.500,00 | |
| 41 | 02.04.01.07.003 | Alat Penggiling Padi | 000001 s/d 000005 | - | | | 2015 | | | | | Pembelian | 533.500,00 | Mesin Penggilingan Padi |
| 42 | 02.05.01.01.001 | Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Ind) | 000003 | Brother / 2000 DLX | | | 2013 | | | | | Pembelian | 2.000,00 | |
| 43 | 02.05.01.04.001 | Lemari Besi/Metal | 000001 | Tiger / 2 Pintu | | | 2015 | | | | | Pembelian | 2.500,00 | |
| 44 | 02.05.01.04.002 | Lemari Kayu | 000001 | - | | Kayu | 2013 | | | | | Pembelian | 2.059,80 | Lemari Barang |

| No. | Kode Barang 1.3. | Jenis Barang / Nama Barang | Nomor Register | Merk/ Type | Ukuran / cc | Bahan | Tahun Pem- belian | Nomor | | | | Asal usul | Harga (ribuan Rp) | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------|-------------------------|--------|-------|--------|------|--------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | Rangka | Mesin | Polisi | BPKB | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 45 | 02.05.01.04.002 | Lemari Kayu | 000002 s/d 000003 | - | | Kayu | 2013 | | | | | Pembelian | 3.994,80 | Lemari Arsip Pintu Dorong |
| 46 | 02.05.01.04.004 | Rak Kayu | 000001 s/d 000002 | - | | | 2012 | | | | | Pembelian | 4.260,00 | Rak Arsip |
| 47 | 02.05.01.04.005 | Filing Cabinet Besi | 000003 s/d 000007 | Brother | | | 2011 | | | | | Pembelian | 8.323,00 | |
| 48 | 02.05.01.04.007 | Brandkas | 000001 | Daichiban Safe | | | 2001 | | | | | Pembelian | 3.355,00 | |
| 49 | 02.05.01.05.003 | Papan Visual/Papan Nama | 000001 s/d 000002 | - | | Kayu | 2011 | | | | | Pembelian | 1.300,00 | Papan Struktur dan Papan Data |
| 50 | 02.05.01.05.003 | Papan Visual/Papan Nama | 000003 s/d 000004 | - | | Kayu | 2013 | | | | | Pembelian | 2.268,00 | Papan Informasi |
| 51 | 02.05.01.05.005 | White Board | 000001 | - | 90x180c m | Kayu | 2011 | | | | | Pembelian | 460,00 | Whiteboard gantung |
| 52 | 02.05.01.05.012 | Mesin Absensi | 000001 | Innovation | | | 2013 | | | | | Pembelian | 4.500,00 | |
| 53 | 02.05.01.05.076 | Papan Nama Instansi | 000002 | - | | Kayu | 2014 | | | | | Pembelian | 2.500,00 | |
| 54 | 02.05.01.05.076 | Papan Nama Instansi | 000003 | - | | | 2014 | | | | | Pembelian | 2.500,00 | |
| 55 | 02.05.01.05.076 | Papan Nama Instansi | 000004 | - | | Besi | 2019 | | | | | Pembelian | 1.340,72 | Belanja Papan Nama Sekretariat Dewa Ketahanan Pangan TA.209 |
| 56 | 02.05.02.01.002 | Meja Kerja Kayu | 000001 | - /Take Wood Jati | | | 2014 | | | | | Pembelian | 1.400,00 | |
| 57 | 02.05.02.01.003 | Kursi Besi/Metal | 000001 s/d 000002 | Chitose / N/A | | | 2014 | | | | | Pembelian | 1.100,00 | |
| 58 | 02.05.02.01.008 | Meja Rapat | 000001 s/d 000004 | - | | | 2011 | | | | | Pembelian | 4.956,00 | |
| 59 | 02.05.02.01.024 | Meja 1/2 Biro | 000002 | - | | Kayu | 2001 | | | | | Pembelian | 1.529,00 | |
| 60 | 02.05.02.01.024 | Meja 1/2 Biro | 000021 | - | | | 2008 | | | | | Pembelian | 2.500,00 | Meja dan Kursi Biro Jati |
| 61 | 02.05.02.01.024 | Meja 1/2 Biro | 000022 s/d 000031 | - | | | 2008 | | | | | Pembelian | 16.500,00 | Meja dan Kursi 1/2 Biro Jati |

| No. | Kode Barang 1.3. | Jenis Barang / Nama Barang | Nomor Register | Merk/ Type | Ukuran / cc | Bahan | Tahun Pem- belian | Nomor | | | | Asal usul | Harga (ribuan Rp) | Keterangan |
|-----|---------------------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------------|--------|-------|--------|------|--------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | Rangka | Mesin | Polisi | BPKB | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 62 | 02.05.02.01.024 | Meja 1/2 Biro | 000032 s/d 000035 | - | | | 2011 | | | | | Pembelian | 4.199,20 | Meja 1/2 Biro |
| 63 | 02.05.02.01.024 | Meja 1/2 Biro | 000036 s/d 000039 | - | | Kayu Jati | 2017 | | | | | Pembelian | 13.236,87 | Meja Pejabat 1 Biro Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa |
| 64 | 02.05.02.01.024 | Meja 1/2 Biro | 000040 s/d 000042 | - | | Jati | 2017 | | | | | Pembelian | 5.052,47 | Meja 1/2 Biro Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa |
| 65 | 02.05.02.01.024 | Meja 1/2 Biro | 000043 | - | | Kayu | 2011 | | | | | Pembelian | 981,20 | Meja Biro |
| 66 | 02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | 000001 s/d 000072 | Gajah Mas | | Besi | 2011 | | | | | Pembelian | 13.320,00 | |
| 67 | 02.05.02.01.031 | Kursi Tamu | 000001 s/d 000002 | - | | Besi | 2018 | | | | | Pembelian | 3.363,34 | Pengadaan Kursi Tunggu 4 Dudukan Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa TA. 2018 |
| 68 | 02.05.02.01.031 | Kursi Tamu | 000003 | - | | | 2008 | | | | | Pembelian | 4.500,00 | Kursi Tamu Jati |
| 69 | 02.05.02.01.036 | Kursi Lipat | 000001 s/d 000030 | Chitose / HNN | | | 2015 | | | | | Pembelian | 14.100,00 | |
| 70 | 02.05.02.01.039 | Meja Komputer | 000001 s/d 000005 | Olympic | | Kayu | 2006 | | | | | Pembelian | 4.500,00 | |
| 71 | 02.05.02.01.048 | Sofa | 000001 | - | | Kayu + Busa | 2018 | | | | | Pembelian | 11.929,00 | Pengadaan Kursi Sofa Ruang Kepala Dinas Pangan Kab. Sumbawa TA. 2018 |
| 72 | 02.05.02.03.001 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | 000001 | Electrolux | | Campur an | 2017 | | | | | Pembelian | 3.000,00 | Pengadaan Vacum Cleaner Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa |
| 73 | 02.05.02.03.003 | Mesin Pemotong Rumput | 000001 | - | | | 2015 | | | | | Pembelian | 3.525,00 | |

| No. | Kode Barang 1.3. | Jenis Barang / Nama Barang | Nomor Register | Merk/ Type | Ukuran / cc | Bahan | Tahun Pembelian | Nomor | | | | Asal usul | Harga (ribuan Rp) | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------------------|----------------------|---|-------------------|----------------------|--------------------|--------|-------|--------|------|--------------|----------------------|---|
| | | | | | | | | Rangka | Mesin | Polisi | BPKB | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 74 | 02.05.02.04.001 | Lemari Es | 000001 | LG / GN- V191RP | | | 2015 | | | | | Pembelian | 2.800,00 | |
| 75 | 02.05.02.04.003 | A.C. Window | 000003 s/d 000004 | Panasonic | | | 2006 | | | | | Pembelian | 36.000,00 | |
| 76 | 02.05.02.04.003 | A.C. Window | 000005 s/d 000006 | Panasonic | | | 2008 | | | | | Pembelian | 16.500,00 | |
| 77 | 02.05.02.04.004 | A.C. Split | 000001 | Uchida / Split | 1 PK | | 2011 | | | | | Pembelian | 4.600,00 | |
| 78 | 02.05.02.04.004 | A.C. Split | 000002 s/d 000004 | poly tron | | besi campura n | 2017 | | | | | Pembelian | 10.824,00 | AC split Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa |
| 79 | 02.05.02.04.004 | A.C. Split | 000005 | Poly tron / PAC 05VX | | campura n | 2018 | | | | | Pembelian | 3.537,31 | |
| 80 | 02.05.02.04.006 | Kipas Angin | 000006 s/d 000008 | Masplon | | | 2011 | | | | | Pembelian | 1.800,00 | |
| 81 | 02.05.02.06.002 | Televisi | 000001 | Sharp / LC- 32LE1851 | | Campur an | 2018 | | | | | Pembelian | 3.885,24 | Pengadaan Televisi 32" Dinas Pangan Kab. Sumbawa TA. 2018 |
| 82 | 02.05.02.06.008 | Sound System | 000001 | Ampli CJ- 9600 / Salon CS 450V MKII Germany | | | 2011 | | | | | Pembelian | 5.000,00 | |
| 83 | 02.05.02.06.018 | Unit Power Supply | 000001 s/d 000003 | - | | | 2011 | | | | | Pembelian | 1.332,00 | PSU Simbadda |
| 84 | 02.05.02.06.032 | Tiang Bendera | 000001 | - | | Besi | 2018 | | | | | Pembelian | 2.000,00 | Belanja Tiang Bendera + Plingan Dinas Pangan TA. 2018 |
| 85 | 02.05.02.06.039 | Mimbar/Podium | 000001 | - | | | 2013 | | | | | Pembelian | 3.500,00 | |
| 86 | 02.05.02.06.048 | Handy Cam | 000001 | Sony / HDR | | | 2014 | | | | | Pembelian | 5.300,00 | |
| 87 | 02.05.02.06.059 | Gordy in/Kray | 000001 s/d 000020 | - | | | 2013 | | | | | Pembelian | 9.950,00 | |

| No. | Kode Barang 1.3. | Jenis Barang / Nama Barang | Nomor Register | Merk/ Type | Ukuran / CC | Bahan | Tahun Pem- belian | Nomor | | | | Asal usul | Harga (ribuan Rp) | Keterangan |
|-----|---------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|--------|-------|--------|------|--------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | Rangka | Mesin | Polisi | BPKB | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 88 | 02.05.02.07.001 | Alat Pemadam/Portable | 000001 | Prima | | Besi | 2017 | | | | | Pembelian | 2.500,00 | Pengadaan Tabung Gas Pemadam Kebakaran (Alat Pemadam Kebakaran) Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa |
| 89 | 02.05.03.01.008 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 000001 s/d 000005 | - | | | 2011 | | | | | Pembelian | 5.197,50 | |
| 90 | 02.05.03.03.005 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 000001 s/d 000002 | - | | Campuran | 2018 | | | | | Pembelian | 4.407,14 | Pengadaan Kursi Eselon III Dinas Pangan Kab. Sumbawa TA. 2018 |
| 91 | 02.05.03.03.006 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 000001 s/d 000004 | Vertuu | | | 2011 | | | | | Pembelian | 10.335,00 | |
| 92 | 02.05.03.03.006 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 000005 | TELK TENSION | | | 2011 | | | | | Pembelian | 1.089,00 | |
| 93 | 02.05.03.03.006 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 000006 s/d 000017 | - | | Campuran | 2018 | | | | | Pembelian | 20.875,91 | Pengadaan Kursi Eselon IV Dinas Pangan Kab. Sumbawa TA. 2018 |
| 94 | 02.05.03.06.005 | Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon III | 000001 | - | | | 2012 | | | | | Pembelian | 2.330,40 | Kursi Sofa |
| 95 | 02.06.01.01.022 | Telephone Hybrid | 000003 | SHARP / Telephone + Fax/mile | | | 2011 | | | | | Pembelian | 1.900,00 | |
| 96 | 02.06.01.01.036 | Microphone/Wireless MIC | 000001 | Kenwood / KLX 8.0 | | | 2015 | | | | | Pembelian | 1.175,00 | |
| 97 | 02.06.01.01.048 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 000001 s/d 000002 | ProLink | | | 2012 | | | | | Pembelian | 1.340,00 | UPS / Stabilizer |
| 98 | 02.06.01.01.048 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 000005 | ICA / CT1082B | | | 2015 | | | | | Pembelian | 4.185,00 | |
| 99 | 02.06.01.01.048 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 000006 | ICA CE | | Besi Campuran | 2017 | | | | | Pembelian | 1.500,00 | UPS ICA CE 1200 Dinas Pangan kabupaten sumbawa |

| No. | Kode Barang 1.3. | Jenis Barang / Nama Barang | Nomor Register | Merk/ Type | Ukuran / CC | Bahan | Tahun Pem- belian | Nomor | | | | Asal usul | Harga (ribuan Rp) | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------|-------|--------|------|--------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | Rangka | Mesin | Polisi | BPKB | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 100 | 02.06.01.02.003 | Camera Electronic | 000002 | Sony Cybershoot / DSC- | | | 2011 | | | | | Pembelian | 2.400,00 | Kamera Digital |
| 101 | 02.06.01.02.003 | Camera Electronic | 000003 | Canon / EOS 600D | | | 2014 | | | | | Pembelian | 6.864,00 | |
| 102 | 02.06.01.02.105 | Layar Film/Projector | 000003 | BenQ / MX613ST | | | 2013 | | | | | Pembelian | 9.600,00 | |
| 103 | 02.08.01.41.100 | Generator | 000001 | - | | Plastik + Baja | 2018 | | | | | Pembelian | 6.000,00 | Belanja Instalasi Hidroponik Dinas Pangan TA. 2018 |
| 104 | 02.08.01.41.100 | Generator | 000002 | - | | Campur an | 2019 | | | | | Pembelian | 6.200,00 | Instalasi Hidroponik + Honorarium TA. 2019 |
| 105 | 02.08.01.41.100 | Generator | 000003 s/d 000004 | - | | Campur an | 2019 | | | | | Pembelian | 12.400,00 | Belanja Instalasi Hidroponik + Honorarium TA. 2019 |
| 106 | 02.08.01.49.009 | Digital Thermometer | 000001 | Hygrometer / Digital Thermomet | | | 2014 | | | | | Pembelian | 600,00 | |
| 107 | 02.10.01.02.001 | P.C Unit | 000007 | Intel / Core i3 | | | 2011 | | | | | Pembelian | 12.375,00 | Komputer ASUS |
| 108 | 02.10.01.02.001 | P.C Unit | 000008 | Intel / Core i3 | | | 2012 | | | | | Pembelian | 9.922,00 | |
| 109 | 02.10.01.02.001 | P.C Unit | 000009 | HP / Pavilion | | | 2013 | | | | | Pembelian | 8.000,00 | PC Build Up |
| 110 | 02.10.01.02.001 | P.C Unit | 000010 | Intel / Core i3 | | | 2015 | | | | | Pembelian | 6.020,00 | |
| 111 | 02.10.01.02.001 | P.C Unit | 000011 | Simbada | | Besi campura n | 2017 | | | | | Pembelian | 6.500,00 | Komputer PC Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa |
| 112 | 02.10.01.02.002 | Lap Top | 000003 | Toshiba | | | 2006 | | | | | Pembelian | 13.404,00 | |

| No. | Kode Barang 1.3. | Jenis Barang / Nama Barang | Nomor Register | Merk/ Type | Ukuran / CC | Bahan | Tahun Pem- belian | Nomor | | | | Asal usul | Harga (ribuan Rp) | Keterangan |
|-----|---------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------|-------|--------|------|--------------|----------------------|---|
| | | | | | | | | Rangka | Mesin | Polisi | BPKB | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 113 | 02.10.01.02.002 | Lap Top | 000004 | Sony | | | 2011 | | | | | Pembelian | 17.600,00 | |
| 114 | 02.10.01.02.002 | Lap Top | 000005 | Toshiba | | | 2012 | | | | | Pembelian | 8.971,50 | |
| 115 | 02.10.01.02.002 | Lap Top | 000006 | Lenovo / B490 | | | 2014 | | | | | Pembelian | 7.500,00 | |
| 116 | 02.10.01.02.002 | Lap Top | 000007 | Lenovo / ThinkPad Edge E440- | | | 2014 | | | | | Pembelian | 13.596,00 | |
| 117 | 02.10.01.02.002 | Lap Top | 000008 s/d 000009 | Asus Notebook A456UQ | | Campur an | 2017 | | | | | Pembelian | 29.972,80 | Pengadaan Laptop Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa |
| 118 | 02.10.01.02.002 | Lap Top | 000010 | Lenovo Thinkpad E431-IP0 | | | 2014 | | | | | Pembelian | 9.993,50 | Pengadaan Laptop |
| 119 | 02.10.01.02.002 | Lap Top | 000011 | Asus Notebook A456UQ | | Campur an | 2017 | | | | | Pembelian | 14.986,40 | Pengadaan Laptop Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa |
| 120 | 02.10.01.02.002 | Lap Top | 000012 | Asus A442U | | Campur an | 2018 | | | | | Pembelian | 14.903,00 | Pengadaan Laptop Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa TA. 2018 |
| 121 | 02.10.01.02.003 | Note Book | 000001 | Lenovo / S215 | | | 2014 | | | | | Pembelian | 4.700,00 | |
| 122 | 02.10.02.01.012 | Hard Disk | 000002 | - | | Campur an | 2018 | | | | | Pembelian | 3.000,00 | Pengadaan Hardisk Eksternal Dinas Pangan Kab. Sumbawa TA. 2018 |
| 123 | 02.10.02.03.001 | CPU (Peralatan Personal Komputer) | 000001 s/d 000002 | Intel / Dual Core | | | 2012 | | | | | Pembelian | 7.744,00 | |
| 124 | 02.10.02.03.002 | Monitor | 000001 s/d 000002 | Samsung / SyncMaster 740N | 17" | | 2007 | | | | | Pembelian | 15.500,00 | |
| 125 | 02.10.02.03.002 | Monitor | 000004 s/d 000005 | Samsung / SA 100 | 19" | | 2012 | | | | | Pembelian | 3.668,50 | |

| No. | Kode Barang 1.3. | Jenis Barang / Nama Barang | Nomor Register | Merk/ Type | Ukuran / cc | Bahan | Tahun Pembelian | Nomor | | | | Asal usul | Harga (ribuan Rp) | Keterangan |
|---------------------|---------------------|--|----------------------|-------------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------|-------|--------|------|--------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | Rangka | Mesin | Polisi | BPKB | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 126 | 02.10.02.03.002 | Monitor | 000006 | Samsung / S20D300 | | | 2015 | | | | | Pembelian | 2.000,00 | |
| 127 | 02.10.02.03.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000001 s/d 000002 | Epson L360 | | Plastik Campuran | 2017 | | | | | Pembelian | 6.000,00 | Printer Epson L360 Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa |
| 128 | 02.10.02.03.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000003 | Epson L360 | | Campuran | 2017 | | | | | Pembelian | 3.000,00 | Pengadaan Printer Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa |
| 129 | 02.10.02.03.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000004 | Epson L385 Scan Wifi | | Campuran | 2017 | | | | | Pembelian | 3.650,00 | Pengadaan Printer Dinas Pangan Kabupaten sumbawa |
| 130 | 02.10.02.03.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000005 | Epson L120 | | Campuran | 2018 | | | | | Pembelian | 2.319,00 | Pengadaan Printer Dinas Pangan TA. 2018 |
| 131 | 02.10.02.03.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000007 s/d 000011 | Canon / MP237 | | | 2013 | | | | | Pembelian | 6.000,00 | Printer + Infus |
| 132 | 02.10.02.03.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000012 s/d 000016 | Canon / MG2570 | | | 2014 | | | | | Pembelian | 6.500,00 | |
| 133 | 02.10.02.03.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000017 | Epson / L220 | | | 2015 | | | | | Pembelian | 2.850,00 | |
| 134 | 02.10.02.03.004 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 000001 | Panasonic KV-S1015C | | Campuran | 2017 | | | | | Pembelian | 25.420,00 | Pengadaan Mesin Scanner + Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen + Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas pangan Kabupaten Sumbawa |
| 135 | 02.10.02.03.018 | Peralatan Personal Komputer lainnya | 000001 s/d 000002 | - | | Campuran | 2018 | | | | | Pembelian | 952,60 | Belanja Mouse Wireless Dinas Pangan TA. 2018 |
| Jumlah Harga | | | | | | | | | | | | 1.649,734,19 | | |



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
 Bidang : Bidang Pertanian
 Unit Organisasi : Dinas Pangan
 Sub Unit : Dinas Pangan
 UPB : Dinas Pangan
 NO. KODE : 12.15.06.11.06.01.01

| No | Jenis Barang / Nama Barang | Nomor | | Kondisi Bangunan (B,KB,RB) | Konstruksi Bangunan | | Luas Lantai (M2) | Letak/Lokasi Alamat | Dokumen Gedung | | Luas Tanah (M2) | Status Tanah | Nomor Kode Tanah | Asal Usul | Harga (ribuan Rp) | Keterangan |
|----|-----------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|-------------------|---|
| | | Kode Barang 1.3. | Regis-ter | | Bertingkat / Tidak | Beton/ Tidak | | | Tanggal | Nomor | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 16 | 17 |
| 1 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 03.01.01.01.001 | 000002 | Baik | | | | | | | | | | Pembelian | 1.178.225,00 | |
| 2 | Bangunan Gedung Kantor lain-lain | 03.01.01.01.005 | 000001 | Baik | Tidak | Beton | | Jln. Bungur No. 7 Semu Sumbawa Besar | 20/04/2018 | 027/178/Dispan/2018 | | | | Pembelian | 80.475,91 | Pembangunan Tempat Parkir + Blaya Perencanaan Tempat Parkir, WC , Pasang Terali + Blaya Pengawasan Tempat Parkir, WC dan Pasang Terali + Blaya Pemeliharaan Tempat Parkir + Honorarium PPK, Pejabat Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pangan |
| 3 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen | 03.01.01.02.001 | 000001 | Baik | | | | EMPANG | | | | | | Pembelian | 52.000,00 | LUMBUNG PANGAN |
| 4 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen | 03.01.01.02.003 | 000002 | Baik | | | | ALAS | | | | | | Pembelian | 45.472,02 | LUMBUNG PANGAN |
| 5 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen | 03.01.01.02.001 | 000003 | Baik | | | | MOYO HILIR | | | | | | Pembelian | 38.988,00 | LUMBUNG PANGAN |

| No. | Jenis Barang / Nama Barang | Nomor | | Kondisi bangunan (B,KB,RB) | Konstruksi Bangunan | | Luas Lantai (M2) | Letak/Lokasi Alamat | Dokumen Gedung | | Luas Tanah (M2) | Status Tanah | Nomor Kode Tanah | Asal Usul | Harga (ribuan Rp) | keterangan |
|-----|-----------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------|-------|-----------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------|
| | | Kode Barang 1.3. | Regis-ter | | Bertingkat / Tidak | Beton/ Tidak | | | Tanggal | Nomor | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 16 | 17 |
| 6 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen | 03.01.01.02.001 | 000004 | Baik | | | | MOYO HILIR | | | | | | Pembelian | 52.576,00 | LUMBUNG PANGAN |
| 7 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen | 03.01.01.02.001 | 000005 | Baik | | | | PLAMPANG | | | | | | Pembelian | 53.165,50 | LUMBUNG PANGAN |
| 8 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen | 03.01.01.02.001 | 000006 | Baik | | | | LUNYUK | | | | | | Pembelian | 53.165,50 | LUMBUNG PANGAN |
| 9 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen | 03.01.01.02.001 | 000007 | Baik | | | | LAPE | | | | | | Pembelian | 53.165,50 | LUMBUNG PANGAN |
| 10 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen | 03.01.01.02.001 | 000008 | Baik | | | | ALAS BARAT | | | | | | Pembelian | 53.165,50 | LUMBUNG PANGAN |
| 11 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen | 03.01.01.02.001 | 000009 | Baik | | | | MOYO UTARA | | | | | | Pembelian | 37.648,75 | LUMBUNG PANGAN |
| 12 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen | 03.01.01.02.001 | 000010 | Baik | | | | UNTIR IWIS | | | | | | Pembelian | 37.648,75 | LUMBUNG PANGAN |
| 13 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen | 03.01.01.02.001 | 000011 | Baik | | | | LAB BADAS | | | | | | Pembelian | 37.648,75 | LUMBUNG PANGAN |
| 14 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen | 03.01.01.02.001 | 000013 | Baik | | | | Mama Kec. Lopok | | | | | | Pembelian | 43.751,00 | LUMBUNG PANGAN |
| 15 | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) | 03.01.01.02.014 | 000001 | Baik | Tidak | Beton | | Batu Lanteh | | | | | | Pembelian | 89.650,00 | Lumbung Pangan + Lantai Jemur |
| 16 | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) | 03.01.01.02.014 | 000002 | Baik | Tidak | Beton | | Sepayung | | | | | | Pembelian | 89.460,00 | Lumbung Pangan + Lantai Jemur |
| 17 | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) | 03.01.01.02.014 | 000004 | Baik | Tidak | Beton | | Marente | | | | | | Pembelian | 89.529,00 | Lumbung Pangan + Lantai Jemur |
| 18 | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) | 03.01.01.02.014 | 000005 | Baik | Tidak | Beton | 216 | Kec. Labuhan Badas | | | | Tanah Milik Pemda | | Pembelian | 478.427,00 | Gudang Cadangan Pangan Pemerintah |
| 19 | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) | 03.01.01.02.014 | 000006 | Baik | Tidak | Beton | | Kec. Moyo Hilir | | | | | | Pembelian | 100.185,13 | Lumbung Pangan + Lantai Jemur |
| 20 | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) | 03.01.01.02.014 | 000007 | Baik | Tidak | Beton | | Kec. Labangka | | | | | | Pembelian | 95.420,58 | Lumbung Pangan + Lantai Jemur |
| 21 | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) | 03.01.01.02.014 | 000012 | Baik | Tidak | Beton | | Kec. Unter Iwes | | | | | | Pembelian | 46.654,63 | Lantai Jemur |

| No. | Jenis Barang / Nama Barang | Nomor | | Kondisi bangunan (B,KB,RB) | Konstruksi Bangunan | | Luas Lantai (M2) | Letak/Lokasi Alamat | Dokumen Gedung | | Luas Tanah (M2) | Status Tanah | Nomor Kode Tanah | Asal Usul | Harga (ribuan Rp) | keterangan |
|-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------|-------|-----------------|--------------|------------------|-----------|-------------------|---|
| | | Kode Barang 1.3. | Regis-ter | | Bertingkat / Tidak | Beton/ Tidak | | | Tanggal | Nomor | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 16 | 17 |
| 22 | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) | 03.01.01.02.014 | 000013 | Baik | Tidak | Beton | | Kec. Alas Barat | | | | | | Pembelian | 46.624,63 | Lantai Jemur |
| 23 | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) | 03.01.01.02.014 | 000016 | Baik | | | | | | | | | | Pembelian | 179.874,40 | Lumbung Pangan + Lantai Jemur Desa Ledang Kec. Lenangguar |
| 24 | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) | 03.01.01.02.014 | 000017 | Baik | | | | | | | | | | Pembelian | 113.846,90 | Lumbung Pangan + Lantai Jemur Dusun Hijrah Baru Desa Usar Mapin Kec. Alas Barat |
| 25 | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) | 03.01.01.02.014 | 000018 | Baik | | | | | | | | | | Pembelian | 113.872,80 | Lumbung Pangan + Lantai Jemur Desa Sepukur Kec. Lantung |
| 26 | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) | 03.01.01.02.014 | 000021 | Baik | | | | | | | | | | Pembelian | 113.846,90 | Lumbung Pangan + Lantai Jemur Desa Rhee Loka Kec. Rhee |
| 27 | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) | 03.01.01.02.014 | 000022 | Baik | | | | | | | | | | Pembelian | 113.871,50 | Lumbung Pangan + Lantai Jemur Desa Pidang Kec. Tarano |
| 28 | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) | 03.01.01.02.014 | 000023 | Baik | | | | | | | | | | Pembelian | 113.846,90 | Lumbung Pangan + Lantai Jemur Desa Stowe Brang Kec. Utan |
| 29 | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) | 03.01.01.02.014 | 000024 | Baik | | | | | | | | | | Pembelian | 42.381,00 | Lantai Jemur Desa Olat Rawa Kec. |
| 30 | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) | 03.01.01.02.014 | 000025 | Baik | | | | | | | | | | Pembelian | 42.389,00 | Lantai Jemur Desa Malili Kec. Moyohilir |
| 31 | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) | 03.01.01.02.014 | 000026 | Baik | | | | | | | | | | Pembelian | 56.423,00 | Lantai Jemur Desa Bunga Eja Kec. Empang |
| 32 | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) | 03.01.01.02.014 | 000027 | Baik | | | | | | | | | | Pembelian | 42.388,00 | Lantai Jemur Desa Hijrah Kec. Lape |
| 33 | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) | 03.01.01.02.014 | 000028 | Baik | | | | | | | | | | Pembelian | 50.000,00 | |

| No. | Jenis Barang / Nama Barang | Nomor | | Kondisi bangunan (B,KB,RB) | Konstruksi Bangunan | | Luas Lantai (M2) | Letak/Lokasi Alamat | Dokumen Gedung | | Luas Tanah (M2) | Status Tanah | Nomor Kode Tanah | Asal Usul | Harga (ribuan Rp) | Keterangan |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|--|
| | | Kode Barang 1.3. | Regis-ter | | Bertingkat / Tidak | Beton/ Tidak | | | Tanggal | Nomor | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) | 03.01.01.02.014 | 000030 | Baik | | Beton | | Desa Juru Mapin Kec. Buer | 03/08/2016 | 08937 | | | | Pembelian | 129.509,80 | Lumbung Pangan + Lantai Jemur Desa Juru Mapin Kec. Buer + Perencanaan |
| 35 | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) | 03.01.01.02.014 | 000031 | Baik | | Beton | | Dusun Poto Pedu Desa Rhee Kec. Rhee | | 08934 | | | | Pembelian | 129.514,80 | Lumbung Pangan + Lantai Jemur Dusun Poto Pedu Desa Rhee Kec. Rhee + Perencanaan dan Pengawasan |
| 36 | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) | 03.01.01.02.014 | 000033 | Baik | | Beton | | Desa Songkar Kec. Moyo Utara | 03/08/2016 | 08939 | | | | Pembelian | 129.476,80 | Lumbung Pangan + Lantai Jemur Desa Songkar Kec. Moyo Utara + Perencanaan dan Pengawasan |
| 37 | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) | 03.01.01.02.014 | 000034 | Baik | | Beton | | Desa Luar Kec. Alas | 03/08/2016 | 08941 | | | | Pembelian | 44.755,00 | Lantai Jemur Desa Luar Kec. Alas |
| 38 | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) | 03.01.01.02.014 | 000035 | Baik | | Beton | | Desa Penyaring Kec. Moyo Utara | 03/08/2016 | 08985 | | | | Pembelian | 44.749,00 | Lantai Jemur Desa Penyaring Kec. Moyo |
| 39 | Gedung Pos Jaga Pemanen | 03.01.01.13.001 | 000001 | Baik | Tidak | Beton | 24 | Kec. Labuhan Badas | | | | Tanah Milik Pemda | | Pembelian | 162.965,00 | Pembangunan Rumah Jaga utk menambah fasilitas Gudang Cadangan Pangan |
| 40 | Bangunan Lantai Jemur Lain-lain (dst) | 03.01.01.25.005 | 000002 | Baik | Tidak | Beton | 100 | Desa Sukamulia Kecamatan Labangka | 17/03/2017 | 647/131/Dispan/2017 | | | | Pembelian | 44.531,01 | Pembangunan Lantai Jemur Desa Sukamulia Kecamatan Labangka |
| 41 | Pagar Pemanen | 03.04.01.04.001 | 000002 | Baik | Tidak | Tidak | 47 | Jalan Bungur No.7 Semu Sumbawa | | | | | | Pembelian | 2.750,00 | |
| Jumlah Harga | | | | | | | | | | | | | | | 4.524.038,93 | |



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

Bidang : Bidang Pertanian

Unit Organisasi : Dinas Pangan

Sub Unit : Dinas Pangan

UPB : Dinas Pangan

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.11.06.01.01

| No. | Jenis Barang / Nama Barang | Nomor | | Konstruksi | Panjan g (Km) | Lebar (M) | Luas (M2) | Letak/Lokasi Alamat | Dokumen | | Status Tanah | Nomor Kode Tanah | Asal usul | Harga (ribuan Rp) | Kondisi (B, KB, RB) | Keterangan |
|---------------------|--|------------------------|---------------|------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------|------------|-------|-----------------|--------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Kode Barang 1.3. | Regis- ter | | | | | | Tanggal | Nomor | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) | 04.02.06.05.007 | 000001 | | 0 | | | | 01/01/1900 | | | 00.00.00.00.000. 0000 | Pembelian | 17.563,00 | Baik | |
| 2 | Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil | 04.04.01.04.001 | 000001 | | | | | | | | | | Pembelian | 800,00 | Baik | Jaringan Air PDAM |
| 3 | Jaringan Distribusi Lain-lain | 04.04.02.02.004 | 000001 | | | | | | | | | | Pembelian | 3.000,00 | Baik | Tambah daya listrik 10.000 VA |
| Jumlah Harga | | | | | | | | | | | | | 21.363,00 | | | |

Aset pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa adalah aset yang diperoleh melalui APBD Kabupaten Sumbawa dan Aset Milik Negara dari Program PIDRA (Participatory Integrated Development in Rainfed Areas).

2.2.3. Unit Kerja

Dinas Ketahanan Pangan tidak memiliki Unit Usaha yang mendukung ketahanan pangan. Hal tersebut dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa itu sendiri tidak memiliki jaringan hingga ke tingkat kecamatan untuk dapat di bentuk unit usaha.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 – 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut. Pengukuran kinerja kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat capaian dari target yang telah ditetapkan pada Dinas Ketahanan Pangan dan kinerja masing-masing program.

Ketahanan Pangan mencakup tiga aspek penting yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian standar pelayanan bidang ketahanan pangan yaitu :

1. Ketersediaan yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik jumlah maupun mutunya serta aman,
2. Distribusi pangan adalah pasokan yang dapat menjangkau keseluruhan wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga dan,
3. Konsumsi pangan adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang serta prefrensinya.

Adapun Indikator Kinerja utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 - 2020 dan pencapaian target kinerja sebagai berikut:

h

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan tahun 2016-2020

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tusi PD | Target NSPK | Target IKK | Target Indikat or Lainnya | Target Renstra PD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|-------------|------------|---------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Penilaian SAKIP perangkat daerah oleh Inspektorat | - | - | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Desa Rawan Pangan (%) | - | - | | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 2,5% | 2,5% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 5,73 % | 5,73 % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,29 | 2,29 |
| 3 | Penguatan Cadangan Pangan (ton) | - | - | | 210 | 214 | 217 | 247 | 249 | 42,501 | 46,382 | 56,428 | 72,576 | 149,777 | 0,20 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,60 |
| 4 | Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji (%) | - | - | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - |

Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa tidak terlepas dari peran berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Adapun pelayanan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Desa Mandiri Pangan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan diwilayahnya,

Tabel 2.6. Program Desa Mandiri Pangan dan masing-masing tahapan

| No. | Kecamatan | Desa | Tahap | Tahun | Sumber Dana |
|-----|-------------|-------------|---------------|-------|-------------|
| 1 | Labangka | Labangka | Pasca Mandiri | 2007 | APBN |
| 2 | Lape | Hijrah | Pasca Mandiri | 2007 | APBN |
| 3 | Moyo Hilir | Olat Rawa | Pasca Mandiri | 2008 | APBN |
| 4 | Utan | Pukat | Pasca Mandiri | 2009 | APBN |
| 5 | Alas Barat | Usar Mapin | Pasca Mandiri | 2009 | APBD Prov. |
| 6 | Lunyuk | Padasuka | Pasca Mandiri | 2010 | APBN |
| 7 | Lopok | Tatede | Pasca Mandiri | 2010 | APBD Prov. |
| 8 | Plampang | SP2 Prode | Pasca Mandiri | 2010 | APBD Prov. |
| 9 | Labangka | Suka Damai | Pasca Mandiri | 2011 | APBN |
| 10 | Labangka | Suka Mulya | Pasca Mandiri | 2011 | APBN |
| 11 | Labangka | Sekokat | Pasca Mandiri | 2011 | APBN |
| 12 | Tarano | Lab. Jambu | Mandiri | 2011 | APBN |
| 13 | Alas Barat | Gontar Baru | Pengembangan | 2012 | APBN |
| 14 | Lenangguar | Ledang | Pengembangan | 2012 | APBD Prov. |
| 15 | Lantung | Sepukur | Pengembangan | 2012 | APBD Prov. |
| 16 | Lenangguar | Telaga | Penumbuhan | 2013 | APBD Prov. |
| 17 | Lantung | Aimual | Penumbuhan | 2013 | APBD Prov. |
| 18 | Sumbawa | Samapuin | Penumbuhan | 2013 | APBD Prov. |
| 19 | Moyo Hulu | Brang Rea | Pengembangan | 2018 | APBN |
| 20 | Batu Lanteh | Kelungkung | Pengembangan | 2019 | APBN Prov. |
| 21 | Alas | Marente | Pengembangan | 2020 | APBN Prov. |
| 22 | Orong Telu | Kelawis | Pengembangan | 2020 | APBN Prov. |

Sumber: Dinas Pangan Kab. Sumbawa 2020

- 2) menjamin ketersediaan energi minimal 2.200 kal/kap/hari dan ketersediaan protein 57 gr/kap/hari dan penyediaan cadangan pangan pemerintah dalam rangka penyediaan pangan pada saat terjadi rawan pangan transien maupun rawan pangan kronis;

- 3) peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui program percepatan diversifikasi konsumsi pangan;
- 4) menjaga stabilisasi harga pangan khususnya gabah/beras melalui penyediaan Bantuan Sosial; dan
- 5) peningkatan peran kelembagaan ketahanan pangan melalui upaya revitalisasi ditingkat masyarakat guna menunjang ketahanan pangan.

Kelompok sasaran dalam setiap jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa berbeda-beda. 1) Dalam rangka pengembangan desa mandiri pangan, kelompok sasaran yang akan menerima manfaat adalah KK miskin yang tergabung dalam kelompok afinitas yang diberdayakan melalui pembinaan dan pemberian bantuan sosial, serta mengintegrasikan berbagai program lintas sektor pada lokasi desa mandiri pangan, 2) dalam rangka penyediaan pangan, sasaran pelaksanaan kegiatan adalah instansi teknis penanggungjawab target produksi dimana dilakukan melalui forum Dewan Ketahanan Pangan, sehingga target-target produksi yang telah ditetapkan dapat tercapai, 3) Upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat antara lain dilakukan kepada kelompok sasaran pada kelompok-kelompok wanita, PKK, serta pelaku usaha dan para pengambil kebijakan, serta advokasi melalui media masa dan melalui peningkatkan pengetahuan bagi anak usia dini pada SD/Mi, sehingga diharapkan pemahaman tentang pola pangan beragam, bergizi seimbang dan aman akan dapat dikenal lebih luas, 4) guna menjaga stabilisasi harga gabah/beras dilakukan melalui pengembangan program Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan memberikan bantuan sosial kepada Gapoktan untuk membeli gabah anggota gapoktan sesuai HPP pada saat panen raya dimana sering harga dibawah HPP, 5) dalam upaya peningkatan peran kelembagaan ketahanan pangan, selain kelembagaan struktural dan fungsional, kelompok sasaran pengembangan kelembagaan ketahanan pangan adalah kelompok masyarakat antara lain PKK, Posyandu, Dasawisma dan kelembagaan masyarakat lainnya yang dapat mendukung pembangunan ketahanan pangan.

Tabel 2.7. Data Kelompok Binaan

| NO | JENIS PELAYANAN | LOKASI DESA | KETERANGAN |
|-----------|---|--------------------|-------------------|
| 1 | Pembinaan Desa Mandiri Pangan | 1. Labangka | Pasca Mandiri |
| | | 2. Hijrah | Pasca Mandiri |
| | | 3. Olat Rawa | Pasca Mandiri |
| | | 4. Pukat | Pasca Mandiri |
| | | 5. Usar Mapin | Pasca Mandiri |
| | | 6. Padasuka | Pasca Mandiri |
| | | 7. Tatede | Pasca Mandiri |
| | | 8. SP2 Prode | Pasca Mandiri |
| | | 9. Suka Damai | Pasca Mandiri |
| | | 10. Suka Mulya | Pasca Mandiri |
| | | 11. Sekokat | Pasca Mandiri |
| | | 12. Lab. Jambu | Mandiri |
| | | 13. Gontar Baru | Pengembangan |
| | | 14. Ledang | Pengembangan |
| | | 15. Sepukur | Pengembangan |
| | | 16. Telaga | Penumbuhan |
| | | 17. Aimual | Penumbuhan |
| | | 18. Samapuin | Penumbuhan |
| | | 19. Moyo Hulu | Pengembangan |
| | | 20. Kelungkung | Pengembangan |
| | | 21. Marente | Pengembangan |
| | | 22. Kelawis | Pengembangan |
| | Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) | 1. Mama | Gapoktan |
| | | 2. Berora | Gapoktan |
| | | 3. Berare | Gapoktan |
| | | 4. Luar | Gapoktan |
| | | 5. Sabedo | Gapoktan |
| | | 6. Penyaring | Gapoktan |
| | | 7. Usar Mapin | Gapoktan |
| | | 8. Lunyuk | Gapoktan |
| 3 | Lumbung Pangan Masyarakat | 1. Bantulanteh | Sumber Hidup |
| | | 2. Labuhan Jamu | Peccatu |
| | | 3. Pidang | Sahabat Tani |
| | | 4. Empang Bawah | Maris Gama |
| | | 5. Sepayung | Tani Makmur |
| | | 6. SP2 Prode | Tiang Tunyang |
| | | 7. Labangka I | Mandiri |
| | | 8. Sekokat | Sehati |
| | | 9. Suka Mulya | Mulya Sari |
| | | 10. Hijrah | Sejahtera |
| | | 11. Tatede | Buin Kaca |
| | | 12. Mamak | Mulyana |
| | | 13. Sepukur | Batu Kreng |
| | | 14. Malili | Buin Resong |
| | | 15. Olat Rawa | Saling Sadu |
| | | 16. Poto | Sepayal |
| | | 17. Kakiang | Uma Aru |
| | | 18. Sebewe | Sopo Ate |

k

| NO | JENIS PELAYANAN | LOKASI DESA | KETERANGAN |
|-----------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | 19. Ledang | Batu Pantek |
| | | 20. Emang Lestari | Balong Niat |
| | | 21. Padasuka | Sumber Barokah |
| | | 22. Seketeng | Kokar Biso Ne |
| | | 23. Boak | Jaya Bersama |
| | | 24. Kerekeh | Batu Patinang |
| | | 25. Lab. Sumbawa | Tekad Makmur |
| | | 26. Rhee Loka | Alam Lestari |
| | | 27. Sabedo | Lemak Bawa |
| | | 28. Pukat | Uma Brang |
| | | 29. Stowe Brang | Lumbung Padi |
| | | 30. Marente | Lonto Engal |
| | | 31. Usar Mapin | Saling Beme |
| | | 32. Gontar Baru | Karya Bersama |
| | | 33. Usar Mapin | Sukses Bersama |
| | | 34. Leseng | Kokar Maras |
| | | 35. Juran Alas | Panujak Telangit |
| | | 36. Juru Mapin | Sagara |
| | | 37. Poto Pedu | Tekad Maju |
| | | 38. Pungkit | Brang Gola |
| | | 39. Songkar | Bina Sejahtera |
| | | 40. Berora | Sahabat |
| | | 41. Pungkit | Brang Gola |
| | | 42. Sempe | Bunga Kemiri |
| | | 43. Motong | Juwat Manis |
| | | 44. Langam | Perintis |
| | | 45. Brang Kolong | Maju Mandiri |
| | | 1. Kakiang | KW Gerung Lestari |
| | | 2. Kelurahan Lempeh | KW Cabe Ijo |
| | | 3. Langam | KW Tinum Lake |
| | | 4. Simu | KW Pona Lembang |
| | | 5. Plampang | KW Mulia |
| | | 6. Marente | KW Melati |
| | | 7. Rhee Loka | KW Bunga Eja |
| | | 8. Pada Suka | KWKacang Panjang |
| | | 9. Kelurahan Samapuin | KW Melati |
| | | 10. Boak | KW Alam Hijau |
| | | 11. Muer | KW Lala Taranam |
| | | 12. Baru Tahan | KW Riam Remo |
| | | 13. Labuhan Jambu | KW Mawar Putih |
| | | 14. Emang Lestari | KW Mawar |
| | | 15. Sepakat | KW Sapito |
| | | 16. Uma Beringin | KW Mekar Sari |
| | | 17. Pungka | KW Tunas Lestari |
| | | 18. Semamung | KW Melati Suci |
| | | 19. Mamak | KW Ijo Ternis |
| | | 20. Labuhan Kuris | KW Ketanga Lestari |
| | | 21. Stowe Brang | Kemang Mener |
| | | 22. Luk | Bunga Melati |
| | | 23. Sempe | Embun Pagi |
| | | 24. Maman | Mekar Putih |
| | | 25. Berang Rea | Sinar Harapan |
| | | 26. Berora | Gelombang Cinta |
| | | 27. Pukat | Brang Mato'a |

| NO | JENIS PELAYANAN | LOKASI DESA | KETERANGAN |
|----|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| | | 28. Jorok | Melati |
| | | 29. Berora | Bunga Lestari |
| | | 30. Batu Lanteh | Plamboyan |
| | | 31. Ongko | Menir Putih |
| | | 32. Jotang | Bunga Tanjung |
| | | 33. Suka damai | Maju Bersama |
| | | 34. Suka Mulya | Usaha Kelompok Tani Kreatif |
| | | 35. Ngeru | Sopo tae |
| | | 36. Olat Rawa | Madu Lestari |
| | | 37. Pelat | Saling Pariri |
| | | 38. Klungkung | Berkarya |
| | | 39. Bt. Dulang | Maju Bersama |
| | | 40. Mapin Beru | Bina Keluarga |
| | | 41. Stowe Brang | Maris gama |
| | | 42. Sempe | Sinar Pulas |
| | | 43. Berang Rea | Mampis Manis |
| | | 44. Ongko | Sakiki Rara |
| | | 45. Berora | Suka Maju |
| | | 46. Baodesa | Puncak Ngengas |
| | | 47. Maman | Sakiki Rara |
| | | 48. Labuhan Kuris | Ngali Mandiri |
| | | 49. Klungkung | Berkarya |
| | | 50. Ngeru | Semangat Baru |
| | | 51. Stowe Brang | Kemang Menir |
| | | 52. Luk | Bunga Melati |
| | | 53. Sempe | Embun Pagi |
| | | 54. Maman | Mekar Putih |
| | | 55. Berang Rea | Sinar harapan |
| | | 56. Berora | Gelombang Cinta |
| | | 57. Kelungkung | Saling Pariri |
| | | 58. Karang Dima | Bukit Lestari |
| | | 59. Kerekeh | Sehati |
| | | 60. Juran Alas | Air gading |
| | | 61. Stowe Brang | Tunas Baru |
| | | 62. Luk | Bunga Eja |
| | | 63. Bungin | Bungin Asri |
| | | 64. Lito | Bangun Desa |
| | | 65. Labuhan Bontong | Manambai |
| | | 66. Jotang Beru | Panto Daya Maju |
| | | 67. Buin Baru | Lestari |
| | | 68. Usar Mapin | Gelampar Mariri |
| | | 69. Brang Biji | Amanah |
| | | 70. Rhee | Mampis Rungan |
| | | 71. Penyaring | Binas Sejahtera |
| | | 72. Poto | Kre Alang |
| | | 73. Jaya Makmur | Mekar Jaya |
| | | 74. Tepal | Bao Merdang |
| | | 75. Labuhan Badas | Harapan Jaya II |
| | | 76. Mama | Unter Temang |
| | | 77. Banda | Dewa Boko |
| | | 78. Bunga Eja | Mandiri |
| | | 79. Penyaring | SalamMuda Hortikultura |

| NO | JENIS PELAYANAN | LOKASI DESA | KETERANGAN |
|----|-----------------|--------------------|----------------------------|
| | | 80. Bunga Eja | Maju Bersama |
| | | 81. Marente | Melati Marente |
| | | 82. Juranalas | Kartika |
| | | 83. Labuhan Jambu | Bukit Cahaya Desa |
| | | 84. Jotang | Jotang Maras |
| | | 85. Lamenta | Lancar Jaya |
| | | 86. Seketeng | Bukit Lestari |
| | | 87. Labuhan Jambu | Kampung Peca |
| | | 88. Lunyuk Ode | Sumber Rejeki |
| | | 89. Stowe Brang | Maris Gama |
| | | 90. Sempe | Sinar Pulas |
| | | 100. Berang Rea | Mampis Manis |
| | | 101. Ongko | Sakiki Rara |
| | | 102. Berora | Suka Maju |
| | | 103. Baodesa | Puncak Ngengas |
| | | 104. Maman | Sakiki Rara |
| | | 105. Labuhan Kuris | Ngali Mandiri |
| | | 106. Klungkung | Berkarya |
| | | 107. Ngeru | Semangat Baru |
| | | 108. Pamanto | Mampis Rungan |
| | | 109. Lenangguar | Maris Gama |
| | | 110. Boak | Boak Berseri |
| | | 111. Jorok | Tumung Barema |
| | | 112. Bugis | Saling Sapa |
| | | 113. Brang Biji | Samalewa |
| | | 114. Dalam | Pasasesenap |
| | | 115. Gontar | Bahagia Bersama |
| | | 116. Lempeh | Tubas Intan Bulaeng |
| | | 117. Perneck | Olat Maras Hortikultura |
| | | 118. Jotang | KWT Jotang Sejahtera |
| | | 119. Labuhan Alas | KUB Duta Anak Pesisir |
| | | 120. Gontar | Forum Solidaritas |
| | | 121. Kakiang | As-Syifa |
| | | 122. Boal | Mawar Merah |
| | | 123. Klungkung | Kemang Miri |
| | | 124. Leseng | Kita Bina Bersama |

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa diarahkan dan difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Sumbawa. berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa ada 3 (tiga) pilar ketahanan pangan yaitu :

↳

1. Ketersediaan Pangan.

Ketersediaan Fisik Pangan di seluruh wilayah di Indonesia

2. Akses Pangan

Kemampuan seluruh rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan

3. Pemanfaatan Pangan

Penggunaan pangan oleh seluruh rumah tangga dan kemampuan masing-masing individu untuk mengonsumsi pangan dan menyerap gizi.

↳

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

**Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator Sesuai Kewenangan PD | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|-----|--|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1 | Penilaian Laki perangkat daerah oleh Inspektorat | 14.500.800 | 20.000.800 | 22.219.840 | 60.659.240 | 37.455.749 | 14.205.800 | 15.821.300 | 21.645.243 | 59.277.206 | 36.437.284 | 0,98 | 0,79 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 31,66 | 31,30 |
| 2 | Desa Rawan Pangan (%) | 255.650.500 | 355.023.500 | 120.496.000 | 80.939.118 | 57.097.412 | 253.411.395 | 290.181.968 | 105.806.000 | 78.825.018 | 57.097.412 | 0,99 | 0,82 | 0,88 | 0,97 | 1,00 | -15,53 | -15,49 |
| 3 | Pengaturan Cadangan Pangan (ton) | 319.906.000 | 348.704.000 | 195.810.846 | 73.426.212 | 1.077.888.006 | 294.435.000 | 341.439.000 | 193.255.800 | 72.546.812 | 1.004.934.300 | 0,92 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,93 | 47,39 | 48,26 |
| 4 | Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji (%) | 67.494.500 | 98.197.700 | 76.979.075 | 39.025.400 | 4.097.000 | 57.808.500 | 94.409.719 | 73.295.484 | 36.966.100 | 3.225.000 | 0,86 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,79 | -18,79 | -18,88 |

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Urusan Pangan di Kabupaten Sumbawa mempunyai posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mampu memilah pangan yang aman, seimbang dan bergizi untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini disadari sepenuhnya keberadaannya menjadi tumpuhan dan harapan masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor ketahanan pangan, pemerintah daerah mempunyai tantangan dan peluang pengembangannya.

2.1.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan sektor ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana ketahanan pangan yang masih terbatas, dinas ketahanan pangan masih melakukan pengujian sampel pangan segar (PSAT) di luar kota. Sehingga diperlukan pengadaan alat penunjang untuk pengujian sampel.
2. Belum Optimalnya pelaporan system kewaspadaan pangan dan gizi
3. Pola Konsumsi pangan belum beragam, bergizi, seimbang dan aman. Pemahaman masyarakat masih kurang akan pentingnya pola konsumsi B2SA.
4. Keamanan Pangan yang masih memerlukan penanganan lebih serius
5. Kurangnya permodalan dalam pengembangan produk pangan kepada masyarakat, hasil pertanian perlu di olah menjadi produk jadi untuk dapat meningkatkan nilai produk itu sendiri serta meningkatkan nilai jual dengan salah satu cara memberikan bantuan berupa modal serta alat pengolahan.
6. Masih memiliki daerah rawan pangan
7. Sumber Daya Manusia yang terbatas
8. Anggaran pelaksanaan kegiatan terbatas

2.1.2 Peluang

Adapun peluang dalam Pengembangan sektor ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pembangunan ekonomi ketahanan pangan dengan meningkatkan nilai tambah bahan pangan mentah menjadi pangan olahan / produk jadi.
2. Sudah adanya peningkatan produksi pangan
3. Tersedianya komoditas pangan surplus
4. Pelatihan yang terintegritas
5. Teknologi dan inovasi di bidang pangan yang semakin berkembang
6. Adanya dukungan pembiayaan di bidang pangan melalui dana APBD, APBN dan hibah lainnya.
7. Tersedianya keanekaragaman pangan lokal

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa

Isu strategis yang sedang dihadapi sekarang adalah perubahan iklim sehingga terjadi krisis pangan dan energi dunia, harga pangan meningkat sehingga negara negara yang semula menjadi pengeksport pangan cenderung menahan produk menjadi stok pangan. Kondisi global tersebut juga terjadi di Indonesia sehingga diperlukan upaya stok pangan Nasional. Isu Nasional strategis lainnya mengenai pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, tingginya konversi lahan, terbatasnya infrastruktur pertanian serta pola pangan penduduk yang tergantung pada beras.

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa, merupakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan kabupaten, Isu strategis yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam Perencanaan pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

1. Penanganan Kerawanan Pangan

Potensi kerawanan pangan di Kabupaten Sumbawa masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah, terjadi gagal tanam/gagal panen dan adanya bencana alam pada musim tertentu serta masih terbatasnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah propinsi/kabupaten/kota serta cadangan pangan di tingkat masyarakat yang langsung dapat di akses oleh masyarakat.

2. Stabilitas Pasokan, Harga dan Distribusi Pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya

produksi dan pemasaran yang mahal serta kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut yang berimplikasi kepada meningkatnya biaya produksi, waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik Karena kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi . Selain itu panjang rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani justru dinikmati oleh orang lain (jejaring pasar lainnya).

3. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan Angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran akan pangan yang beragam bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas. Kecendrungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal yang masih rendah dan cenderung menurun serta berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor yang cenderung digemari oleh masyarakat mengakibatkan penurunan tingkat konsumsi pangan yang sehat seimbang berbasis pangan lokal. Oleh karena itu upaya peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat harus dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

4. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman antara lain sebagai akibat dari terjadinya cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan serta masih ditemukan pangan kadaluarsa yang beredar dimasyarakat. Permasalahan yang menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh

kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya control peredaran bahan berbahaya untuk pangan, belum efektifnya pengawasan keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara tegas, dan yang paling penting adalah perlunya pengetahuan dan ketelitian masyarakat dalam memilah dan memilih bahan pangan yang akan di beli dan dikonsumsi.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan disebutkan, bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Koordinasi antar OPD dalam menyelesaikan masalah rawan pangan dan pola pangan harapan (PPH) belum optimal. Rawan pangan dan PPH harus diselesaikan secara | Kebijakan antar OPD terkait yang belum terintegrasi. | 1. Ketersediaan dan Akses Pangan yang masih terbatas |

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|---|---------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | bersama-sama antar OPD terkait dan kebijakannya harus terintegrasi. | | 2. Konsumsi Pangan pokok dan Pangan lainnya kurang beragam serta masih tingginya konsumsi beras |

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1. Visi RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026

Berdasarkan Permasalahan dan kondisi serta tantangan yang akan dihadapi, serta memperhatikan dokumen RPJM Nasional, RPJMD Provinsi NTB dan RPJP Kabupaten Sumbawa dan visi Kepala Daerah Terpilih, maka dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa 2021 –2026 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA SUMBAWA GEMILANG YANG BERKEADABAN”

Dalam rumusan Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa 2021-2026 yang merupakan cerminan pokok-pokok visi yang menjiwai seluruh rumusan visi tersebut. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

SUMBAWA GEMILANG :

mengandung makna Kabupaten Sumbawa yang memiliki daya saing kuat serta mampu berkompetisi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

BERKEADABAN :

Pernyataan *berkeadaban* mengandung makna masyarakat Sumbawa yang memegang teguh agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari (*Adat Barenti Ko Sara', Sara' Barenti Ko Kitabullah. Taket Ko Nene, Kangila Boat Lenge*) sehingga terbentuk kondisi kehidupan yang “Senap Semu” (dimensi kesejahteraan spritual). Situasi kehidupan masyarakat sejahtera secara spritual, masyarakat yang diliputi oleh suasana kedamaian dan ketentraman sebagai berkah Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas ketaqwaan hamba-Nya dalam menjalankan perintah agama), “Riam Remo” (dimensi kesejahteraan sosial yaitu gambaran suasana masyarakat yang penuh dengan kedamaian, persahabatan dan rasa kekeluargaan dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga

negara), “Nyaman Nyawe” (kesejahteraan ekonomis merupakan gambaran kondisi masyarakat yang berkecukupan. Berkecukupan mengandung pengertian bahwa ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan telah tersedia dan terdistribusi secara cukup. Artinya masyarakat “Nyaman Nyawe” merupakan wujud masyarakat yang maju dan sejahtera sebagai implikasi keberhasilan pembangunan).

3.2.2. Misi RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021 – 2026

Langkah-langkah dalam mewujudkan Visi di atas, dengan dilakukan Misi sebagai berikut:

MISI 1 : SUMBAWA SEHAT DAN CERDAS

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daerah yang maju melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan.

MISI 2 : SUMBAWA SEJAHTERA DAN MANDIRI

Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah sektor agribisnis, industri dan pariwisata.

MISI 3 : SUMBAWA BERSIH DAN MELAYANI

Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien

MISI 4 : SUMBAWA AMAN DAN BERBUDAYA

Mewujudkan masyarakat yang beriman, berkarakter, terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum dan terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.

MISI 5 : SUMBAWA TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

Pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugas pelayanan Dinas Ketahanan Pangan memiliki keterkaitan Misi Pembangunan Kabupaten Sumbawa antara lain:

Misi 2 : Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah sektor agribisnis, industri dan pariwisata.

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Lokal yang berkualitas

kr

- Sasaran** : Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Prioritas (pertanian, perikanan dan kehutanan; Perdagangan; Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum; Industri Pengolahan)
- Misi 3** : Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien
- Tujuan** : Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Pelayanan Publik
- Sasaran** : Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi

3.3. Telaahan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Nasional dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB

Visi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 adalah Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Mengacu pada tugas dan fungsi kementerian pertanian yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan dan untuk mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, kementerian pertanian mendukung satu dari Sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Badan Ketahanan Pangan mendukung misi Kementerian Pertanian yaitu **“Mewujudkan Ketahanan Pangan”**. Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Menjabarkan misi pembangunan kementerian pertanian, maka tujuan pembangunan kementerian pertanian, kontribusi Badan Ketahanan Pangan pada tujuan :

1. Mewujudkan ketahanan pangan dengan tujuan : Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan

2. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian dengan tujuan : Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

Sasaran Strategis Pembangunan kementerian pertanian pada program Badan Ketahanan Pangan merupakan hasil yang ingin dicapai dari suatu program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) Kementrian Pertanian tahun 2020-2024 yang disusun dengan metode Balanced ScoreCard (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu *Stakeholders, customer, internal process dan learning and growth perspective*. Sasaran Strategis (SS) Kementrian Pertanian sebagai berikut :

- SS.1 Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri
- SS.2 Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
- SS.3 Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
- SS.4 Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian
- SS.5 Tersedianya Prasarana dan Sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
- SS.6 Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan
- SS.7 Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional
- SS.8 Terwujudnya birokrasi kementrian pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
- SS.9 Terkelolanya anggaran kementrian pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Berdasarkan peta strategis Kementerian Pertanian, kontribusi Badan Ketahanan Pangan pada SS-1 “Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri” dan SS-3 “Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional”. Sasaran Strategis ini berada pada *customer perspective* yang berkontribusi dalam mencapai sasaran strategis 1 “Meningkatnya kesejahteraan ekonomi petani” pada *stakeholders perspective*. Dengan kata lain, outcome Kementrian Pertanian berupa meningkatnya kesejahteraan ekonomi petani tidak dapat tercapai tanpa adanya dukungan dan peran serta dari program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan.

Berdasarkan Renstra Kementrian Pertanian tersebut diatas, Badan Ketahanan Pangan telah menjabarkan sasaran strategis tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Sasaran Strategis Badan Ketahanan Pangan 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri (SS1)
2. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional (SS3)
3. Terwujudnya birokrasi kementerian pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima (SS8)
4. Terkelolanya anggaran kementerian pertanian yang akuntabel dan berkualitas (SS9)

Dari empat Sasaran Strategis di jabarkan menjadi enam sasaran program sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penjualan Beras kepada Toko Tani Indonesia (TTI)
2. Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rawan Pangan
3. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
4. Meningkatnya Konsumsi Sayur, Buah, Daging dan Protein Asal Ternak
5. Terwujudnya Birokrasi Badan Ketahanan Pangan yang Efektif dan Efisien
6. Terkelolanya Anggaran Badan Ketahanan Pangan yang Akuntabel dan Berkualitas

Dari 6 Sasaran Program dijabarkan menjadi delapan Indikator kinerja Sasaran Program sebagai berikut :

- a. Persentase Lembaga Distribusi Pangan yang mandiri yang melakukan penjualan beras kepada Toko Tani Indonesia / TTI (%)
- b. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)
- c. Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan (%)
- d. Konsumsi sayur dan buah (gram/kapita/hari)
- e. Konsumsi daging (Kg/kapita/hari)
- f. Konsumsi protein asal ternak (gram/kapita/hari)
- g. Nilai Reformasi birokrasi badan ketahanan pangan (nilai)
- h. Nilai kinerja anggaran badan ketahanan pangan (nilai)

Target Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 digambarkan pada tabel dibawah ini:

| No. | Sasaran Strategis | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target | |
|--|--|--|--|--------|-------|
| | | | Sasaran Program | 2020 | 2024 |
| 1 | Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri | 1. Meningkatnya Penjualan Beras kepada Toko Tani Indonesia (TTI) | 1. Persentase Lembaga Distribusi Pangan yang mandiri yang melakukan penjualan beras kepada Toko Tani Indonesia / TTI (%) | 20 | 20 |
| | | 2. Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rawan Pangan | 2. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%) | 18 | 10 |
| 2 | Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional | 3. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) | 3. Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan (%) | 85 | 85 |
| | | 4. Meningkatnya Konsumsi Sayur, Buah, Daging dan Protein Asal Ternak | 4. Konsumsi sayur dan buah (gram/kapita/hari) | 260.2 | 316.3 |
| | | | 5. Konsumsi daging (Kg/kapita/hari) | 13.5 | 14.7 |
| 6. Konsumsi protein asal ternak (gram/kapita/hari) | 10.65 | 11.04 | | | |
| 3 | Terselenggaranya birokrasi kementerian pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima | 5. Terwujudnya Birokrasi Badan Ketahanan Pangan yang Efektif dan Efisien | 7. Nilai Reformasi birokrasi badan ketahanan pangan (nilai) | 23.62 | 24.51 |
| 4 | Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas | 6. Terkelolanya Anggaran Badan Ketahanan Pangan yang Akuntabel dan Berkualitas | 8. Nilai kinerja anggaran badan ketahanan pangan (nilai) | 89.44 | 89.48 |

Target Renstra Badan Ketahanan Pangan yang ingin dicapai setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

| SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------|------|------|------|------|
| CUSTOMER PERSPECTIVE | | | | | |
| SS 1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri | | | | | |
| 1. Persentase lembaga distribusi pangan yang mandiri yang melakukan penjualan beras kepada toko tani Indonesia / TTI (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%) | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| SS 3. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional | | | | | |
| 1. Persentase PSAT yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan (%) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 2. Meningkatnya Konsumsi Sayur, Buah, Daging dan Protein Ternak | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Konsumsi Sayur dan Buah (gram/kap/hr) | 260,2 | 273,2 | 286,9 | 301,3 | 316,3 |
| Konsumsi Daging (kg/kap/hr) | 13,5 | 13,8 | 14,1 | 14,4 | 14,7 |
| Konsumsi Protein Asal Ternak (gr/kap/hr) | 10,65 | 10,75 | 10,85 | 10,94 | 11,04 |
| LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE | | | | | |
| SS 8. Terselenggaranya birokrasi kementerian pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima | | | | | |
| 1.Nilai birokrasi Badan Ketahanan Pangan (nilai) | 23,62 | 23,84 | 24,07 | 24,29 | 24,51 |
| SS 9. Terkelolanya anggaran kementerian pertanian yang akuntabel dan berkualitas | | | | | |
| 1.Nilai Kinerja anggaran badan ketahanan pangan (nilai) | 89,44 | 89,45 | 89,46 | 89,47 | 89,48 |

Visi Gubernur Nusa Tenggara Barat terpilih dalam Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 adalah : “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”. Dengan Misi Gubernur NTB adalah:

1. Nusa Tenggara Barat Tangguh dan Mantap
2. Nusa Tenggara Barat Bersih dan Melayani
3. Nusa Tenggara Barat Sehat dan Cerdas
4. Nusa Tenggara Barat Asri dan Lestari
5. Nusa Tenggara Barat Sejahtera dan Mandiri
6. Nusa Tenggara Barat Aman dan Berkah

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk pada Misi ke 5 NTB yaitu : Nusa Tenggara Barat Sejahtera dan Mandiri dengan **akselerasi penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang memberi nilai tambah yang bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi, dengan :**

Tujuan : Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berkualitas

Indikator : Angka Kemiskinan

Sasaran : Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan

Indikator : Pola Pangan Harapan

Arah Kebijakan : Mendorong keragaman pola konsumsi dan meningkatkan kewaspadaan pangan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Sumbawa telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031.

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.

Pembangunan ketahanan pangan tidak terlepas dari ketersediaan lahan. Dalam RTRW telah disebutkan kawasan yang dapat mendukung ketahanan pangan yaitu :

1. Kawasan peruntukan pertanian, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan pertanian lahan basah, peruntukan pertanian lahan kering, dan peruntukan hortikultura;
2. Kawasan peruntukan perkebunan, yang dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah kabupaten
3. Kawasan peruntukan perikanan, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan perikanan tangkap, peruntukan budidaya perikanan, dan peruntukan kawasan pengolahan ikan

Kawasan tersebut ditetapkan dengan tujuan melindungi dan menjamin tersedianya kawasan dan lahan pertanian, perkebunan dan perikanan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian milik petani, meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, dan mewujudkan revitalisasi pertanian.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan Isu-Isu Strategis dilakukan melalui kebijakan dan kegiatan pembangunan masa lalu, hal tersebut mempengaruhi visi, misi, output dan manajemen. Cara tersebut akan mempengaruhi keputusan bagaimana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa melakukan Perencanaan, realisasi dan pengawasan pembangunan ketahanan pangan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek dalam meningkatkan ketahanan pangan yang mengalami kemajuan serta di sisi lain terdapat pula permasalahan atau kendala yang masih dihadapi sehingga perlu penanganan lebih terencana, sinergis dan berkelanjutan.

Beberapa Isu-Isu Strategis dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumbawa antara lain :

1. Peningkatan dan Pemantapan hasil pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Sumbawa. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil pertanian melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan distribusi dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan. Hal tersebut diyakini dapat meningkatkan ketahanan pangan menjadi lebih stabil.
2. Peningkatan Teknologi Informasi untuk mencapai pelayanan prima dalam melakukan pengembangan dan pembinaan kepada para masyarakat didaerah-daerah terpencil yang jauh dari kota. Hal tersebut di upayakan agar masyarakat dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan keluarga menjadi lebih beragam, bergizi, seimbang dan aman serta dapat meningkatkan perekonomiannya.

k

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana di bidang pangan yang dapat memadai dan mendukung peningkatan keamanan pangan segar serta peningkatan olahan produk pangan jadi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil(*outcome*) program Perangkat Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa menentukan nomenklatur tujuan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Tujuan, sasaran beserta indikator yang disebutkan pada Tabel T-C.25 berikut merupakan bentuk pernyataan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa memastikan akan berkontribusi terhadap indikator-indikator sasaran pemerintah daerah yang berkesuaian, sebagai berikut:

Tabel-TC 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa

| No | Tujuan PD | Sasaran PD | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke | | | | |
|----|--|--|--|---|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatkan Laju Pertumbuhan PDRB sektor unggulan dengan peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi | | Nilai reformasi birokrasi | 51,32 | 51,91 | 52,50 | 55,00 | 57,50 |
| | | Meningkatnya kategori Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan | Kategori Predikat hasil evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan | BB | BB | BB | BB | A |
| | | Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah | Indeks Ketahanan Pangan Daerah | 82,32 | 82,43 | 82,70 | 82,75 | 82,84 |

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Strategi di definisikan sebagai suatu langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sementara itu, Arah Kebijakan dimaksudkan sebagai suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa beserta indikator dan targetnya, maka selanjutnya dilaksanakan penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan mengarahkan pada ketercapaian dari target yang telah ditentukan pada Tabel TC-26 selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai berikut:

Tabel T-C. 26
Hubungan antara Visi, Misi KDH/WKDH dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa

| | | | |
|---|--|--|--|
| Visi | : Mewujudkan Sumbawa Gemilang yang berkeadaban | | |
| Misi 2 | : Sumbawa Sejahtera dan Mandiri | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Lokal yang berkualitas | Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Prioritas | Peningkatan Capaian Indeks Pola Pangan Harapan | Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat dengan Memperhatikan Distribusi dan Kewaspadaan Pangan. |
| Visi | : Mewujudkan Sumbawa Gemilang yang berkeadaban | | |
| Misi 3 | : Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien | | |
| Meningkatkan Birokrasi yang bersih dan pelayanan publik | Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi | Optimalisasi Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan | 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | | 2 Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |

| Visi | : Mewujudkan Sumbawa Gemilang yang berkeadaban | | |
|------|--|--------------------------|---|
| | | Daerah Kabupaten/Kota | 3 Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | | | 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | | 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | | 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa program merupakan suatu penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diperbarui melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa umumnya dan Dinas Ketahanan Pangan pada khususnya telah melakukan penyesuaian sebagaimana amanat kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam regulasi di atas dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah.

Program pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan merupakan program strategis Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Setiap program memiliki sejumlah kegiatan dimana setiap kegiatan merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Selanjutnya setiap kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan yang merupakan serangkaian aktivitas belanja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan sub keluaran (*suboutput*) dalam rangka mencapai keluaran (*output*) suatu kegiatan. Adapun rencana program, kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa periode Tahun 2021-2026 disajikan pada T-C.27 berikut ini :

| Kode Rekening | Tahun | Sasaran | Program | Kejati | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Sasaran Kinerja | NGRP Indikator | Formulasi | Sasaran | Sumber / Pemada Dana | Pelaksana / Penanggung Jawab | Objek Kerja | Sasaran | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana CPD | Unit Kerja bertanggung jawab | Lokasi | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|---------|--------|--|--|--|---|--|---------|--|---|---|---------|---|-------------|---------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|---------------|--|------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | Th 2021 | | Th 2022 | | Th 2023 | | Th 2024 | | Th 2025 | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | | | | | | | | |
| 21000120504 | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kepmendagri No. 050-5899/2021 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | Sekretariat | Sekretaris Dinas | Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2 | 2 | 67.048.814 | 2 | 19.042.900 | 2 | 21.057.100 | 2 | 23.162.900 | 2 | 25.479.100 | 2 | 28.027.000 | Dinas Ketahanan Pangan | Kab. Sambawa | | | | | | | |
| 210001209 | | | | | Pembelajaran Barang MIB Daerah Penjangkauan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang MIB Daerah Penjangkauan Pemerintah Daerah yang dipelihara | Tertelaksana Barang MIB Daerah Penjangkauan Pemerintah Daerah yang dipelihara | Kepmendagri No. 050-5899/2021 | Jumlah Barang MIB Daerah Penjangkauan Pemerintah Daerah yang dipelihara | Unit | Sekretariat | Sekretaris Dinas | Barang MIB Daerah | 18 | 7 | 87.814.814 | 13 | 54.751.250 | 44 | 634.772.500 | 44 | 858.727.000 | 43 | 187.172.400 | 43 | 228.577.198 | Dinas Ketahanan Pangan | Kab. Sambawa | | | | | | | |
| 21000120902 | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perlengkapan Kantor Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perlengkapan Kantor Dinas Operasional atau Lapangan | Kepmendagri No. 050-5899/2021 | Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara Tahun n | Unit | Sekretariat | Sekretaris Dinas | Kendaraan Dinas Roda Empat | 2 | 2 | 56.504.750 | 2 | 50.701.250 | 2 | 67.512.500 | 2 | 117.015.000 | 2 | 140.418.000 | 2 | 148.531.800 | Dinas Ketahanan Pangan | Kab. Sambawa | | | | | | | |
| 21000120903 | | | | | Peralatan dan Mesin Kantor dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | Tertelaksana Peralatan dan Mesin Lainnya | Kepmendagri No. 050-5899/2021 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | Unit | Sekretariat | Sekretaris Dinas | Komputer, Printer, dan Laptop | 6 | 6 | 9.340.084 | 11 | 6.050.000 | 11 | 7.290.000 | 11 | 8.712.000 | 11 | 10.454.400 | 11 | 12.545.500 | Dinas Ketahanan Pangan | Kab. Sambawa | | | | | | | |
| 21000120906 | | | | | Pembelajaran / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi | Tertelaksana Pembelian/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kepmendagri No. 050-5899/2021 | Jumlah Gedung Kantor yang dirhab Tahun n | Unit | Sekretariat | Sekretaris Dinas | Kantor Dinas Ketahanan Pangan | 1 | - | - | - | - | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | - | - | - | - | - | Dinas Ketahanan Pangan | Kab. Sambawa | | | | | | |
| 210001210 | | | | | Pembelajaran / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi | Tertelaksana Pembelian/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kepmendagri No. 050-5899/2021 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi | Unit | Sekretariat | Sekretaris Dinas | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan | 5 | - | - | - | 25 | 15.000.000 | 25 | 16.500.000 | 25 | 16.150.000 | 25 | 16.150.000 | 25 | 18.065.000 | Dinas Ketahanan Pangan | Kab. Sambawa | | | | | | |
| 21000121011 | | | | | Pembelajaran / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi | Tertelaksana Pembelian/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kepmendagri No. 050-5899/2021 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi | Unit | Sekretariat | Sekretaris Dinas | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 5 | - | - | - | 5 | 16.000.000 | 5 | 16.500.000 | 5 | 16.150.000 | 5 | 16.150.000 | 5 | 18.065.000 | Dinas Ketahanan Pangan | Kab. Sambawa | | | | | | |
| | | | | | Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah | Indeks Ketahanan Pangan Daerah | Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan Daerah | Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 | Diikuti oleh Badan Pangan Nasional berdasarkan Indikator Ketahanan Pangan, Distribusi Pangan dan Pemanfaatan Pangan di Kabupaten Sambawa | Indeks | Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | Laporan Indeks Ketahanan Pangan | 82,31 | 82,32 | 843.881.810 | 82,43 | 4.139.341.628 | 82,70 | 6.254.749.331 | 82,75 | 6.567.115.782 | 82,81 | 7.888.794.175 | 82,92 | 9.855.633.823 | Dinas Ketahanan Pangan | Ech. Sambawa | | | | | | | |
| 210002 | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKOWISATA UNTUK KEMULUTAN DAN KEMAMPUAN PANGAM | Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan | Peningkatan Ketersediaan Pangan | Peraturan Menteri 18 Tahun 2021 (PPPO) | Jumlah Cadangan Pangan dibagi Jumlah Kebutuhan Pangan di Kab. 100 | % | Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | Laporan Ketersediaan Pangan | 470 | 470 | 180.453.233 | 308,51 | 3.818.135.500 | 308,51 | 4.078.876.003 | 308,55 | 6.090.093.250 | 308,69 | 8.376.117.188 | 308,85 | 7.962.848.882 | Dinas Ketahanan Pangan | Kab. Sambawa | | | | | | | |
| 21000201 | | | | | Penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Kawasan Pangan sesuai Kawasan Pangan Kabupaten Kota | Persentase Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang dikelola | Terbilangnya Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) | Undang-undang No. 18 Tahun 2012 | Jumlah Lumbung Pangan yang dikelola di bag/jumlah lumbung pangan yang telah dibangun di Kab. 100 | % | Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | Lumbung Pangan | 15,0 | 17,4 | 180.453.233 | 22,4 | 3.818.135.500 | 24,5 | 4.078.876.000 | 28,4 | 5.098.093.250 | 31,8 | 6.376.117.188 | 33,3 | 7.962.848.882 | Dinas Ketahanan Pangan | Kab. Sambawa | | | | | | | |
| 2100020101 | | | | | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia | Tersedianya Infrastruktur Lumbung Pangan | Kepmendagri No. 050-5899/2021 | Jumlah Pembangunan lumbung pangan tahun n | Unit | Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | Bangunan Lumbung Pangan | - | 2 | 190.304.738 | 3 | 20.350.000 | 7 | 608.750.000 | 8 | 1.010.937.500 | 10 | 1.263.871.875 | 12 | 1.578.582.643 | Dinas Ketahanan Pangan | Kab. Sambawa | | | | | | | |
| 2100020102 | | | | | Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur | Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia | Tersedianya Infrastruktur Lantai Jemur | Kepmendagri No. 050-5899/2021 | Jumlah Pembangunan Lantai Jemur tahun n | Unit | Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | Bangunan Lantai Jemur | - | - | - | 3 | 54.000.000 | 7 | 147.500.000 | 8 | 104.575.000 | 10 | 230.488.750 | 12 | 288.085.837 | Dinas Ketahanan Pangan | Kab. Sambawa | | | | | | | |
| 2100020103 | | | | | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia | Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan | Kepmendagri No. 050-5899/2021 | Jumlah Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Tahun n | Unit | Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | RMI, Bad Dyer, Timbangs | - | - | - | 3 | 2.843.776.500 | 7 | 3.043.125.000 | 8 | 3.903.906.250 | 10 | 4.754.882.312 | 12 | 5.843.803.515 | Dinas Ketahanan Pangan | Kab. Sambawa | | | | | | | |
| 2100020104 | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik | Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik | Tertelaksana Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik | Kepmendagri No. 050-5899/2021 | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik | Laporan | Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik | 1 | - | - | - | 1 | 59.625.000 | 1 | 74.531.250 | 1 | 93.164.002 | 1 | 119.455.078 | Dinas Ketahanan Pangan | Kab. Sambawa | | | | | | | | |
| 2100020105 | | | | | Persyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan | Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan | Tersyusunnya Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan | Kepmendagri No. 050-5899/2021 | Jumlah Dokumen Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Tahun n | Dokumen | Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | Dokumen Peta Jalan | 1 | 1 | 11.150.500 | - | - | 1 | 17.875.000 | 1 | 22.343.750.000 | 1 | 27.920.887 | 1 | 34.612.128 | Dinas Ketahanan Pangan | Kab. Sambawa | | | | | | | |
| 210103 | | | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASIDAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Skor PPH | Peningkatan Skor PPH Konsumsi | Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 60 | Diikuti menggunakan aplikasi Harmonisasi Azadisa PPH data Sumatera Tahun n | Poin | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan | Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan | Laporan PPH | 88,8 | 77,4 | 697.235.240 | 84 | 1.081.203.844 | 84,8 | 943.613.531 | 89,8 | 1.165.598.922 | 92,4 | 1.223.815.087 | 85,2 | 1.432.872.541 | Dinas Ketahanan Pangan | Kab. Sambawa | | | | | | | |
| 21010301 | | | | | Penyediaan dan Pempangan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten Kota dalam | Jumlah Pangan Pokok atau Pangan Lainnya yang didistribusikan di kabupaten kota | Tersedianya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya | Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 60 | Jumlah Pangan Pokok atau Pangan Lainnya yang didistribusikan | Paket | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan | Pangan Pokok atau Pangan Lainnya | 20 | 20 | 57.418.860 | 25 | 188.253.827 | 25 | 121.053.207 | 30 | 188.818.572 | 30 | 189.911.760 | 35 | 225.438.688 | Dinas Ketahanan Pangan | Kab. Sambawa | | | | | | | |
| 2101030101 | | | | | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 114 | Diikuti menggunakan aplikasi NBM | Laporan | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan | Laporan NBM | 1 | 1 | 4.281.250 | 1 | 2.699.950 | 1 | 9.750.000 | 1 | 12.875.000 | 1 | 15.477.500 | 1 | 18.125.250 | Dinas Ketahanan Pangan | Kab. Sambawa | | | | | | | |
| 2101030102 | | | | | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia | Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Kepmendagri No. 050-5899/2021 | Jumlah Laporan berbasis sumber daya lokal Tahun n | Laporan | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan | Laporan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1 | - | - | - | 1 | 58.000.000 | 1 | 61.800.000 | 1 | 67.760.000 | 1 | 74.536.000 | Dinas Ketahanan Pangan | Kab. Sambawa | | | | | | | | |
| 2101030103 | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Tertelaksana Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Kepmendagri No. 050-5899/2021 | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Laporan | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan | Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 1 | 1 | 881.880 | - | - | 1 | 9.800.000 | 1 | 10.780.000 | 1 | 11.858.000 | 1 | 13.043.800 | Dinas Ketahanan Pangan | Kab. Sambawa | | | | | | | |

| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Sasaran Kinerja | NSPK Indikator | Femidasi | Sumber / Pemada Data | Pelaksana / Penanggung Jawab | Objek Kinerjanya | Target Kinerja Program dan Kegiatan Papanannya | | | | | | | | | | | | Kendali Kinerja pada akhir periode Pemira OPD | Unit Kerja OPD yg bertanggung jawab | | | | |
|---------------|--------|---------|---------|----------|--------------|-------------------|-----------------|----------------|----------|----------------------|------------------------------|------------------|--|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|-----|---------|---|-------------------------------------|-----|---------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | Th 2021 | | Th 2022 | | Th 2023 | | Th 2024 | | Th 2025 | | Rp. | Tingkat | | | Rp. | Tingkat | | |
| | | | | | | | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | | | | | | | | |
| 2080301011 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Kab. Sumbawa | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080301012 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Kab. Sumbawa | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080301013 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Kab. Sumbawa | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080301014 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Kab. Sumbawa | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080301015 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Kab. Sumbawa | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja dalam rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan menjadi fokus layanan urusan pilihan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator dan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang menjadi fokus layanan urusan pilihan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No. | Indikator Tujuan PD (x), Indikator Sasaran PD (xx), Indikator Program (xxx) | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026) |
|-------|---|--|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Nilai reformasi birokrasi | 51,10 | 51,32 | 51,91 | 52,50 | 55,00 | 57,50 | 57,50 |
| 1.1 | Kategori predikat nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan | BB | BB | BB | BB | BB | A | A |
| 1.1.1 | Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan | 72,00 | 72,47 | 74,67 | 76,87 | 79,07 | 81,27 | 83,47 |
| 1.2 | Indeks Ketahanan Pangan Daerah | 82,31 | 82,32 | 82,43 | 82,70 | 82,75 | 82,84 | 82,92 |
| 1.1.1 | Tingkat Ketersediaan Pangan | 470 | 470,05 | 308,51 | 308,53 | 308,55 | 308,65 | 308,65 |
| 1.1.2 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 86,60 | 77,40 | 84,00 | 86,80 | 89,60 | 92,40 | 95,20 |
| 1.1.3 | Persentase desa rawan pangan | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |

| No. | Indikator Tujuan PD (x), Indikator Sasaran PD (xx), Indikator Program (xxx) | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026) |
|-------|---|--|-----------------------------|------|------|------|------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.4 | Tingkat aman konsumsi pangan segar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

BAB VIII

PENUTUP

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat yang terdiri dari perguruan tinggi, swasta, petani, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan serta lembaga pangan di masyarakat.

Semangat kedaulatan pangan dan kemandirian pangan harus tertanam dengan kokoh di setiap pelaku pembangunan ketahanan pangan agar diperoleh hasil yang optimal. Agar pembangunan ketahanan pangan dan gizi berjalan optimal maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, dan adanya partisipasi masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan yang menyentuh masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan keluarga sampai tingkat perseorangan perlu diselaraskan dengan pembangunan ekonomi nasional dan daerah, upaya pengentasan kemiskinan, dan responsif gender. Selanjutnya, dengan dukungan sarana dan prasarana, serta kelembagaan ketahanan pangan yang kuat maka diharapkan akan mampu mengakomodasikan kebutuhan pangan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya pangan yang tersedia.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 adalah penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sumbawa yang merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra tersebut dalam implementasinya perlu disesuaikan dan dijabarkan lebih rinci setiap tahun dalam sasaran, kegiatan, penganggaran, pelaksanaan dan penanggungjawab.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021–2026 akan diwujudkan melalui kegiatan prioritas Daerah dan Nasional yaitu: (1) Pengembangan Ketersediaan, Cadangan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan; (2) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan;

(3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan segar; sedangkan kegiatan pendukungnya adalah Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya.

Disadari bahwa untuk mencapai pembangunan ketahanan pangan tidaklah mudah, namun dengan partisipasi, semangat dan komitmen semua pihak karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah di susun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan.

Implementasi Renstra Dinas Ketahanan Pangan tahun 2021–2026 pada tahapan perencanaan pembangunan ketahanan pangan tahunan, masih dimungkinkan mengalami perbaikan dan penyempurnaan karena terjadinya perubahan kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan.

